KOTA PADANG TEMPO DOELOE
(Zaman Kolonial)

Oleh Mestika Zed

Seri Monograf PKSBE No. 6

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
DITERIMA TGL. : 20 Juni 2011
SUMBER HARGA : Hd
KOLEKSI : KI
No. INVENTARIS : 213 / Hd / 2011 - KI (I)
KLASIFIKASI : 959.8 Zed k.1

KOTA PADANG TEMPO DOELOE ZAMAN KOLONIAL

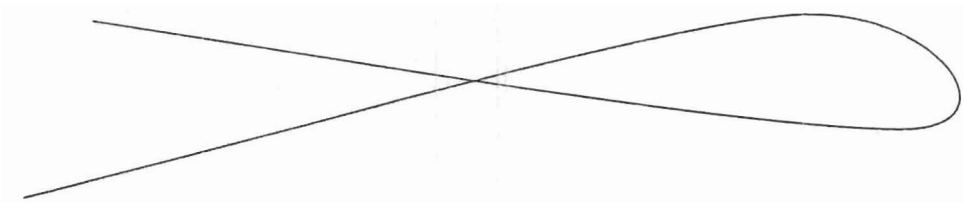

Oleh: Mestika Zed

SERI: MANUSKRIP NO 04

Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi
Fakultas Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

KOTA PADANG TEMPO DOELOE ZAMAN KOLONIAL

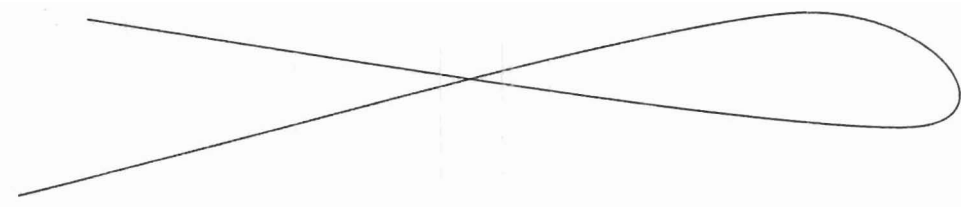

Oleh: Mestika Zed

SERI: MANUSKRIP NO 04

Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi
Fakultas Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

2009

WARGA kota Padang yang beruntung hidup dalam tiga zaman (zaman kolonial Belanda, pendudukan Jepang dan zaman kemerdekaan) tentunya dapat menyaksikan irama perubahan-perubahan fisik dan suasana Padang dari masa ke masa. Perubahan-perubahan itu terkesan semakin cepat dan meluas pada periode setelah merdeka, khususnya sejak zaman pembangunan selama beberapa tahun terakhir ini. Sebaliknya semakin jauh ke belakang ke periode awal abad ini, dan lebih-lebih jauh lagi ke abad-abad sebelumnya, perubahan-perubahan itu berlangsung secara sangat lambat sekali.

Makalah ini berupaya menyoroti sejarah pertumbuhan kota Padang menjadi kota yang modern sejak awal abad ke-20 dan peran strategis yang dimainkan Padang, baik sebagai pusat pemerintah dan pusat komersial Sumatera Barat sejak lama, maupun sebagai salah satu pusat kegiatan kaum pergerakan nasional di daerah ini sejak awal abad ke-20. Untuk itu akan dilihat pertama-tama morfologi Kota Padang awal abad ke-20 dan pertumbuhan administrasi kolonial di kota ini. Sesudah itu dilanjutkan dengan sejarah pertumbuhan gerakan-gerakan nasional lokal dari pelbagai cabang aliran sampai pada masa pendudukan Jepang. Akhirnya tulisan ini akan ditutup dengan fase transisi radikal dari zaman pendudukan Jepang ke zaman Republik.

Morfologi Kota Padang Awal Abad ke-20

Wajah Padang sebelum perang agaknya tidak begitu berbeda dengan keadaan awal proklamasi. Pada awal abad ini (1905), luas wilayah Kota Padang hanya sekitar 11.5 km persegi dengan penduduk sekitar 47.000 jiwa.[1] Dalam tahun 1930 penduduknya bertambah ± 5% atau menjadi sekitar 52.000 jiwa. Sunguhpun begitu, pada masa itu Padang sudah termasuk kota terbesar ketiga di Sumatra (setelah Palembang dan Medan). Sesudah kemerdekaan atau setelah usai revolusi (1950), luas Kota Padang bertambah tiga kali lipat dari keadaan sebelum perang atau 33 km persegi dengan

[1] *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie* (s'-Gravenhage-Leiden: Martinus Nijhoff-E.J. de Brill, 1919), hal 235.

penduduk sekitar 123. 000 jiwa atau meningkat ± 240%.[2]

Perkembangan yang amat menyolok baru terjadi pada sejak tahun 1980, ketika perluasan geografis kota sudah mencapai sekitar 695 km persegi dengan penduduk berjumlah 480.000 jiwa. Perubahan fisik kota yang begitu drastis juga terlihat dari pembangunan fisik yang luar biasa, sehingga mengubah tata-kota dari bentuknya yang lama.[3] Sekedar untuk menangkap gambaran Kota Padang di zaman kolonial, catatan seorang wartawan yang melancong ke kota ini dalam tahun 1926 amatlah mengesankan.

> Perasaan saya setelah sampai di kota ini semata-mata melihat cara [gaya] Sumatra, karena letaknya rumah-rumah maupun keadaan kampung beserta dengan jalan-jalannnya sudah berbeda dengan keadaaan Tanah Jawa. Orang yang lalu lintas pun berlainan benar kelihatannya. Di sini saya lihat orang lebih gembira pada mukanya. Itu tak heran karena bangsa yang mendiami negeri ini bangsa yang terkenal suka merdeka, sebagai burung elang [yang] suka bekerja sendiri, sehingga nyata kelihatan dari lagak lagunya yang tak tertahan-tahan ..... Pemandangan di sini seperti negeri bumiputra umumnya, rumah-rumahnya yang bertiang tinggi dan beratapkan rumbia. Satu sama lain berantara jauh-jauh, yang dibatasi oleh kebun-kebun kecil dalam pekarangan, di mana tumbuh berbagai-bagai tanam-tanaman seperti, kelapa, manggis, rambutan dan jeruk manis, jambu dan sebagainya. Rumah-rumah hampir semua, kecuali di Pasar Pondok atau rumah-rumah gedung governement, terbuat dari kayu belaka. Atap rumah seperti yang buruk saja semua nampaknya, boleh jadi karena terlalu panas di sana, sehingga *rumbia* itu seperti buruk kelihatannya. Negeri ini memang terhitung negeri yang amat panas, tetapi meski begitupun, tidak tercela benar tentang kesehatannya.
>
> Di mana-mana nampak *tenisbaan* [lapangan tenis]. Rupanya

---

[2] Freek Colombijin, "The Colonial Municipal Council in Padang (Sumatra) as Political Arena", *Journal of Southeast Asian Studies*, 26, 2 (1995), hal. 265.

[3] Barangkali karena konsep pembangunan di zaman Orde Baru cenderung sinonim dengan membangun segala sesuatu yang baru, sehingga semua yang lama harus digusur. Akibatnya Morfologi tata-kota yang lama sulit dikenali. Karena kurangnya kepedulian sejarah, maka generasi yang hidup di zaman pembangunan dewasa ini dapat dipastikan tidak lagi mengenal bagaimana Kota Padang bertumbuh menjadi seperti yang mereka saksikan sekarang. Apalagi untuk menangkap jiwa perubahan yang terjadi dari masa ke masa, generasi sekarang tidak lagi dapat menyaksikan secara agak utuh mengingat bukti-bukti fisik peninggalan lama nyaris punah, kecuali hanya dapat dilacak lewat catatan-cataan sejarah

> permainan ini lekas benar menjalar ke mari dan dihitung suatu permainan yang *populair*, sampai ke negeri-negeri Padang Panjang dan Payakumbuh dan lain-lain yang lebih kecil didapati *tenisbaan*.[4]

Kesan bahwa Padang relatif makmur dan maju dengan pelbagai kegiatan perdagangan dan politik, sebagaimana dilukiskan oleh laporan wartawan di atas, tentulah dari satu sudut tertentu saja. Tetapi sumber-sumber Belanda sezaman juga cenderung mengatakan demikian. Catatan seorang pelancong Belanda yang datang ke Padang tahun 1922 menyebut kota ini sebagai "*de stad van het heimwee naar de toekomst*" (kota dambaan masa depan).[5] Dia tentunya berbicara tentang kalkulasi statistik ekonomi bagi kemakmuran Belanda, sedang pribumi boleh jadi hanya terkena kecipratannya.

Meskipun demikian, dia tidak melulu berbicara tentang hal-hal yang mengagumkan tentang *Emmahaven* (Pelabuhan Teluk Bayur) yang permai, tentang hubungan yang lancar antara Padang dan pedalaman, tentang kemajuan pendidikan dan persuratkabaran, tentang kebiasaan "menggalas (membeli barang oentoek didjoel lagi), sehingga tak heran bila di sini kedapatan toko-toko Eropa dan Bank-Bank besar jang memboeka kantoor penoelongnja disini...".

Ada juga segi lain yang ganjil di kota ini. "Perkara kebakaran bagi Kota Padang", tulisnya, "sudah tak begitu mengejutkan. Saya rasa tidak ada yang yang lebih tinggi pegang *record* di Indonesia, yang bisa melawan Padang buat kerap kalinya kebakaran...".[6] Terbakar lalu dibangun lagi. Masih di awal abad ini, Padang juga dijadikan tempat buangan bagi pejahat kriminal atau tokoh "pemberontak". Maka penjara tua yang "angker" di Pulau Karam itu bukan hanya disediakan untuk penjahat lokal kelas kakap, melainkan juga kiriman

---

[4] Dikutip dengan perubahan ejaan asli dengan EYD dari Prada Harahap, *Dari Pantai ke Pantai. Perdjalanan ke Soematra* (Weltevreden: Uitgevers Maatschapij "Bintang Hindia", 1926), hal. 43-44. [Disesuaikan dengan ejaan baru; cetak miring dari saya].

[5] H.C. Zentgraaff en W.A. Van Goudoever, *Sumatraantjes* ('s-Gravenhage: Uitgeverij W. Van Hoeve, MCMXLII), hal. 100.

[6] *Ibid.*

dari Jawa atau dari tempat lain di luar Sumatra Barat.[7] Siapa menyangka, misalnya, tokoh Samin Surotiko alias Sardjan, tokoh "Gerakan Samin" yang menggemparkan penguasa Belanda di Pulau Jawa itu dibuang ke Padang, akhirnya hidup terlunta-lunta di Koto Tangah sampai meninggalnya.[8]

Bagaimanapun perubahan-perubahan wajah Padang dari coraknya yang asli sebagai *big village* menjadi sebuah kota yang sibuk dalam kegiatan komersial dan pemerintahan tampaknya lebih merupakan fenomena abad ke-20 ini. Semakin jauh masuk ke belakang, ke periode abad ke-19, Padang sebetulnya hanyalah sebuah kampung besar, yang dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berlainan etnik. Pada awal abad lalu, misalnya, Padang baru berpenduduk sekitar 8500 orang (1819).[9] Semakin jauh ke belakang, ke periode ketika Padang masih merupakan kelompok dusun-dusun yang terserak di atas tanah gurun, yang didominasi oleh hutan rawa dan pohon rumbia, semakin kelihatan ciri yang aslinya sebagai dataran rendah yang rawan banjir. Sampai sekarang pun orang masih dapat mengenal nama-nama kampung yang sangat dekat hubungannya dengan topografis Padang "tempo doeloe" ini. Sebut saja kampung Pulau Air, Tarandam, Pulau Karam, Rawang dan Ganting.[10] Semuanya dekat dengan air, bencah dan banjir. Di dataran rendah tanah gurun berawa-rawa itulah Padang didirikan oleh nenek moyang dahulu kala.

Pemukiman yang mula-mula di Padang menempati bagian selatan Batang Arau, yaitu di suatu kawasan yang sampai sekarang dikenal dengan Seberang Padang. Dari sini mereka berkembang biak dan sebagian pindah ke utara, di mana mereka mendirikan kampung baru seperti Alang Laweh, Ranah, Olo, Parak Gadang dan Ganting. Kelompok pemukiman inilah yang menjadi cikal bakal dari Kota Padang. Masyarakatnya hidup berkelompok-kelompok dalam

---

[7] Bulan September 1889, misalnya, sekitar 40 orang buangan dari Jawa tiba di Teluk Bayur, sebagian besar adalah penjahat kelas berat. Lihat Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu* (Jakarta: C.V. Yasaguna, 1988), hal. 307.

[8] *bid.,* hal. 301-3.

[9] Netscher (1881) hal. 4; Prada Harahap (1926), hal. 42.

[10] Gusti Asnan, "Padang Akhir Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20. Profil Kota Kolonial"

delapan suku, disebut orang *Nan Salapan Suku*. Masing-masingnya dipimpin oleh seorang *penghulu,* seperti yang terdapat di daerah Minangkabau di pedalaman.[11] Kaum bangsawan ini menguasai hampir semua sumber ekonomi yang penting, terutama tanah dan kemudian dari hubungan-hubungan perdagangan atau perantara setelah kedatangan Aceh dan Belanda sekitar abad ke-16 dan 17.[12]

Data penduduk Padang sebelum abad ke-18 tidak tersedia. Data awal abad k-19 mencatat bahwa jumlah penduduk Padang diperkirakan hanya sekitar 8.500 jiwa. Jumlah itu terus meningkat bersamaan dengan masuknya pendatang-pendatang baru, seperti terlihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1: Penduduk Padang 1878-1905

No. Kelompok Etnik	1878	1905	1930
1. Kulit Putih (Eropa)	1.063	1.800	2.592
2. Bumiputra (Inlander)	3.594	39.00	40.744
3. Timur Asing:			
- Cina	2.630	5.000	7.263
- India/ Jepang	572	1.000	1.455*
- Arab	112	200	
Jumlah Total	27.971	47.000	52.054

*termasuk Arab

Sumber: data 1878 (Netscher, 1881:4); data 1905 (Stibbe, 1919: 235); data 1930 (Colombijn, 1994): 48; data 1930 dari Volkstelling 1930, Deel IV, hal.156-57.

(Padang: Pusat Penelitian Unand, 1992), hal. 11.

[11] Sampai tahun 1730, jumlah kaum penghulu yang diakui VOC sebagai bangsawan di Padang berjumlah tiga belas orang. Pada abad ke 19 ada 24 orang; di antara mereka diangkat Belanda sebagai 'panglima', seperti yang pernah dimuat dalam koran Padang, *Nieuw Padangsch Handelsblad* 23 Mei 1891.

[12] Kompeni Belanda (VOC) membuka pos perdagangan di Padang pada tahun 1663. Sebuah benteng atau *loji* (berasal dari kata Belanda *logeren* = tempat tinggal) dibangun dekat Muara, di atas tanah seluas satu hektar itu terletak agak menjorok ke dalam sekitar 1250 m dari mulut Batang Arau. Benteng itu kecuali berfungsi sebagai tempat tinggal Residen dan barak tentara, sekaligus sebagai gudang tempat menyimpan barang-barang ekspor-impor Belanda. Bangunan benteng Kompeni dan pasar di dekatnya merupakan simbol kekuasaan ekonomi (*emporium*) Kompeni di Padang sejak pertengahan abad ke-17.

Data di atas tidak hanya menunjukkan pertambahan penduduk Padang dari waktu ke waktu, melainkan juga keberagaman komposisi etniknya. Minoritas yang paling kecil, tetapi paling berkuasa ialah orang kulit putih (Belanda), kemudian kelompok Timur Asing (khususnya Cina, India dan Arab) dan baru orang pribumi sebagai warga kelas tiga, yang pada umumnya berasal dari pedalaman dari daerah lain. Akhirnya ada kelompok Orang Nias yang didatangkan Belanda ke Padang sebagai budak dan jongos sejak abad ke-18.[13] Namun penting dicatat, bahwa komposisi penduduk seperti terlihat dari tabel di atas, mencerminkan bahwa masyarakat Kota Padang sejak semula sudah membentuk apa yang disebut masyarakat majemuk (*plural society*)[14].

Komposisi penduduk sekaligus juga dapat menggambarkan morfologi kota, di mana kantong-kantong pemukiman dan pusat kota, pasar, kantor-kantor pemerintahan tersebar menurut garis ras atau etnik. Kebanyakan orang Eropa bertempat tinggal di *Plein van Rome* dan Jalan Blantung (Jalan Jend. Sudirman sekarang), "tetapi banyak poela jang menjelat di kampoeng-kampoeng Boemiputra karena orang-orang pensoen jang tiada seberapa pendapatannja itoe banjak di kota Padang".[15] Kantor-kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah yang sudah ada sejak abad ke-19 membentuk pola 'kantong' yang sangat eksklusif dengan unsur birokratis dan pasar sebagai bagian utama dalam struktur sosial kota.

Pusat kota sejak akhir abad ke-19 berada dekat Taman Melati

---

[13] Pada abad ke-19, jumlah mereka lebih besar dari pendatang pribumi non-Minangkabau. Mereka didatangkan ke Padang oleh VOC untuk dijadikan sebagai budak. Ini setidaknya telah berlangsung sejak awal abad ke-18. Sampai pertengahan abad ke-19, Orang Nias, masih diperlakukan sebagai *pandelingen* (harfiah pergadaian), artinya 'diperlakukan' sebagai budak dan diharuskan mengabdi kepada "induk-semang" mereka yang membeli atau yang memberi pekerjaan sebagai jongos. Dengan terjadinya gelombang urbanisasi sejak akhir abad ke-19, banyak di antara mereka yang berbaur dengan adat Minangkabau dan sebagian besar beragama Kristen dan sebagian sudah beragama Islam.

[14] Masyarakat majemuk, seperti didefinisikan oleh Furnivall, adalah suatu ciri khas kota-kota zaman kolonial umumnya, di mana terdapatnya kumpulan penduduk yang terdiri dari pelbagai etnik yang berbeda-beda dan bertempat tinggal secara terpisah satu sama lain tanpa kemauan bersama, kecuali di bawah kemauan politik kolonial, yang sangat diskriminatif. Lihat J.S. Furnivall, *Netherlands India. A Study of Plural Economy* (Cambridge: 1939), hal. 122.

[15] Parada Harahap (1926), hal. 44

sekarang, di mana pernah dibangun sebuah tugu, "Tugu Michiels" (diambilkan dari nama mantan Gubernur Militer Belanda yang pertama, A.V. Michiels) sebagai lambang kekuasaan Belanda di Sumatra Barat. Kantor-kantor pemerintahan juga dibangun di tugu tersebut, yang di depannya terdapat lapangan Michiels (*Michielsplein*), kemudian bernama lapangan *Dipo* yang sudah digusur untuk bangunan Taman Budaya sekarang). Demikian juga bangunan penting lainnya seperti Greja Protestan (*Koepelkerk*) dan *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi), Hotel Oranje (Hotel Muara sekarang) dan Centraal Hotel tidak jauh dari Hotel Oranye. Agak ke timur terdapat lapangan *Plein van Rome* (lapangan Imam Bonjol sekarang) dan di dekatnya terdapat Gedung *Societeit* sebagai tempat hiburan dan pesta-pesta kaum bule. Rumah Gubernur (kemudian Residen) -- sebelum dipindahkan ke Jalan Blantung (Jalan Jend. Sudirman atau di Gubernuran sekarang) – merupakan bagian yang relatif baru dibuka untuk kawasan elit pemerintah.

Di luar jantung kota terdapat daerah pemukiman penduduk. Sejak abad ke-19 Padang dibagi ke dalam delapan *Wijk* (Kampung). Kepala kampung biasanya diangkat dari kaum bangsawan setempat. Salah satu keluarga bangsawan terkemuka di Padang pada masa ini ialah Tuanku Bandaro Tan Batuah, berasal dari *Wijk VII* (Kampung 7) di Alang Laweh. Keturunan bangsawan Padang umumnya tinggal di sekitar Alang Laweh, di mana mereka tinggal di rumah-rumah besar bertiang tinggi, yang dibangun di tengah taman atau kebun-kebun luas. Alang Laweh sejak awal abad ke-20 juga dikenal sebagai benteng gerakan Kaum Tua dengan basisnya di Mesjid Gantiang sekarang. Kita akan kembali membahas ini di belakang nanti.

Orang Indo-Eropa, meskipun termasuk ke dalam kelompok Eropa, kedudukan mereka dianggap lebih rendah atau warga kelas dua ras kulit putih. Kebanyakan mereka ini masuk ke Padang dalam era Perang Paderi, menggantikan kedudukan tentara sewaan Belanda dari bangsa Belgia, Jerman, Perancis dan Swiss. Seusai Paderi kebanyakan tentara sewaan itu tidak kembali ke negeri mereka, melainkan keluar dari dinas tentara dan bergiat di bidang usaha perdagangan atau perkebunan. Sebagian mengawini wanita Belanda atau gadis Cina, tetapi jarang sekali terjadi perkawinan

dengan wanita setempat. Sebagian besar usaha penerbitan surat kabar berbahasa Belanda yang terbit di Padang sejak abad lalu dipegang oleh kelompok Indo, seperti *Soematra Courant* (1859), *Padangsche Newsblad en Advertentieblad* (1859), *Padangsch Handelsblad* (1871), Percetakan N.V. *Snelpersdrukkerij Insoelinde.* Koran berbahasa Melayu, yang paling awal ialah *Bentara Melayu* (1877), *Pelita Ketjil* (1886) dan *Utusan Melaju* juga diusahakan oleh pengusaha Indo Padang.

Kelompok Timur Asing adalah lapisan kedua dalam struktur masyarakat kolonial. Dalam kepustakaan Belanda kelompok ini disebut *Vreemde Oosterlingen* yang terdiri dari kelompok etnik Cina, Arab dan India. Kedatangan mereka ke kota Padang berlangsung dalam periode yang berbeda-beda. Orang Cina khususnya sudah ada sejak zaman VOC sekitar pertengahan abad ke-17. Dalam tahun 1670-an usaha orang Cina Padang terus berkembang dan mereka dapat membeli tanah dari bangsawan setempat. Mereka pada mulanya adalah pedagang perantara ('broker') VOC yang dikirim dari Batavia dan sebagai agen kepercayaan Belanda orang Cina tidak hanya memperoleh izin membangun pemukiman tersendiri di kota ini (yakni Kampung Cina), tetapi juga membentuk suatu komunitas dengan kepemimpinan tersendiri. Dalam tahun 1682, Belanda telah mengangkat seorang 'Letnan Cina", sebagai pemimpin komunitas Cina yang pertama di Padang.

Berkat hubungan-hubungan dagang mereka ke pedalaman, orang Cina telah dimanfaatkan oleh Belanda sebagai penunjuk jalan bagi Belanda dalam penaklukan daerah pedalaman Minangkabau awal abad ke-19. Kelompok etnik Cina juga bertanggung jawab memasukkan perdagangan candu dan madat ke Minangkabau, yang merupakan salah satu issu sentral dalam pergolakan Paderi awal abad ke-19. Pengusaha-pengusaha besar Cina sudah terkenal sejak abad ke-19, seperti nama-nama Lie Heng, Lie Machio, Lie Sing dan Hua A-Chiao. Sebagian Cina Padang juga bekerja sebagai agen-agen leverensir Perusahaan kapal NHM Belanda dan mengurus toko-toko sampai ke pengecer barang-barang impor, menyewa hak monopoli tertentu dari pemerintah Belanda (misalnya menyewakan bangunan dan kegiatan penagih berbagai macam pajak), rentenier, menjual

candu, mengelola perjudian. Ada juga di antaranya yang mengelola surat kabar seperti *Sri Sumatera* (1918).

Berbeda dengan kebanyakan Cina Sumatra, yang relatif terbuka dan melakukan kawin-mawin dengan penduduk setempat, Cina Padang agak tertutup dan pembauran mereka dengan penduduk setempat amat terbatas, karena faktor agama dan adat setempat yang kuat. Lebih penting lagi, kompetisi dari pedagang pribumi setempat menyebabkan Cina Padang sulit untuk mengembangkan usaha mereka ke pedalaman, kecuali lewat jasa penguasa Belanda.

Hanya orang *India* barangkali yang agak terinterasi ke dalam unsur pribumi karena mereka umumnya menganut Islam. Orang India termasuk kelompok etnik asing yang mula-mula datang ke Padang. Sekitar abad ke-9 Masehi, kelompok *gilde* (mirip dengan perusahaan 'firma' a la Eropa abad Renaissance) sudah beroperasi di sekitar pantai barat Sumatera, termasuk di Pariaman dan Padang. Namun gelombang kedatangan orang India (orang Keling atau Tamil dari daerah Coromandel, India Selatan) diperkirakan sudah berlangsung sejak masa pemerintahan sementara Inggris sejak akhir abad ke-18.

Kampung Kling dengan sebuah Mesjid Keling sudah didirikan sejak masa pemerintahan Inggris di Padang. Kebanyakan orang India Kling menjadi pedagang rempah-rempah dan kain dari negeri asal mereka. Meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak (lihat tabel), orang Kling, seperti juga orang Cina, masih memelihara tradisi negeri asal mereka.

Kelompok orang Arab diperkirakan datang ke Padang pada masa pra VOC dan lewat jalur pantai timur via Kerajaan Siak yang memiliki hubungan dengan Minangkabau dan Penang di Semenanjung Malaka. Jumlah mereka tidak begitu banyak (lihat tabel), tetapi faktor agama ikut mengurangi jarak sosial mereka dengan penduduk setempat. Pada dasawarsa kedua abad ke-19, sejumlah pedagang Arab yanga menetap di Padang adalah kelompok pedagang yang sukses, di antaranya ialah Syekh Achmad telah membina hubungan niaga ke pedalaman. Belanda juga pernah memanfaatkan hubungan-hubungan baik antara orang Arab dengan

penduduk setempat untuk siasat negosiasi Perang Paderi, sehingga berakhir dengan penangkapan Tuanku Imam Bonjol.

Penduduk Bumiputra Padang umumnya berasal dari kelompok orang Minangkabau yang pindah dari pedalaman khususnya dari Solok-Selayo dan juga dari daerah lain. Generasi pertama orang Padang tinggal mengelompok dalam delapan kelompok suku, disebut *Nan Selapan Suku*. Pemukim pertama di Padang mula-mula menempati bagian selatan Batang Arau, yaitu di suatu kawasan yang sampai sekarang dikenal dengan Seberang Padang. Dari sini mereka berkembang biak dan sebagian pindah ke utara, di mana mereka mendirikan kampung baru seperti Alang Laweh, Ranah, Olo, Parak Gadang dan Ganting. Kelompok pemukiman inilah yang menjadi generasi pertama sebelum VOC datang ke Padang abad ke-17. Sebagian migran yang bergerak dari pedalaman Minangkabau tidak meneruskan perjalanan mereka ke daerah Padang sekarang, melainkan menetap di nagari Pauh dan Koto Tangah, yang dalam administrasi kolonial Belanda sejak abad ke-19 dikenal dengan *Padangsche Ommelanden* (Padang Luar Kota, lihat peta).

Jadi, sebelum kedatangan Kompeni Belanda (VOC), di Padang hanyalah sebuah dusun kecil dengan tempat tinggal yang terserak di tanah gurun yang didominasi oleh rawa-rawa yang ditumbuhi pohon rumbia. Dengan keadaan alam seperti itulah pemukiman pertama bekembang menjadi *nagari* Padang.[16] Pada mulanya mereka hidup dalam kelompok suku-suku yang dikepalai oleh seorang *penghulu* suku dari garis bangsawan. Mereka ini merupakan kelompok yang paling berkuasa dan pada masa VOC menjadi "patner" Kompeni dalam kegiatan perdagangan. Sampai tahun 1730, jumlah penghulu yang diakui VOC sebagai "raja kecil", berjumlah tiga belas orang. Sebagai kelompok bangsawan [aristokrat] pantai yang khas, yang

[16] Asal usul nama Padang itu memiliki versi cerita 'lama' yang berbeda-beda. Sebagian mengatakan, bahwa salah seorang generasi pemukim pertama menemukan sejumlah peninggalan di suatu tempat, di antaranya terdapat sebuah 'kanun' kecil, sebuah pisau, sebuah porselen yang bertuliskan kalimah *La ilaha ilallah, Muhammad Rasoel Allah*, dan sebuah pedang'. Benda yang terakhir inilah yang dijadikan nama tempat tinggal mereka. Tetapi ada juga yang mengatakan, bahwa nama Padang diambilkan dari kata 'padang' (dataran luas), yang dijumpai oleh pendatang pertama dari pedalaman Minangkabau, setelah mereka melintasi kawasan *Bukit Barisan* yang membatasi daerah pedalaman dan kawasan pantai barat di sekitar Kota Padang sekarang.

memelihara sistem sosial tersendiri dengan hak-hak 'privilage' atas gelar dan pemilikan, kedudukan mereka berbeda dari kaum penghulu yang terdapat di daerah asal mereka di pedalaman.

Perbedaan itu bukan saja tampak dari suasana tempat tinggal dan gaya hidup mereka, tetapi juga sumber-sumber kekuasaan mereka. Tinggal di rumah-rumah besar bertiang tinggi (bukan "rumah gadang"), yang dibangun di tengah taman atau kebun-kebun luas di sekitar pusat kota, kaum bangsawan Padang memiliki "regalia" (tanda-tanda kebesaran), seperti tercermin dari sistem gelar, hubungan kawin-mawin dan sumber mata pencaharian dan sistem gelar yang relatif berbeda daripada yang dijumpai di dataran tinggi pedalaman. Di sini gelar kebangsawanan menunjukkan ciri superioritas kekuasaan dan hubungan pertalian darah tertentu yang dipelihara secara ketat sebagai rujukan keluarga yang dipertahankan turun temurun, seperti *Sutan* atau *Puti* (Putri) untuk keturunan 'raja' sebagai lapisan pertama dan *Marah* dan *Siti* untuk lapisan kedua, biasanya mengacu kepada pertalian darah atau jenjang keturunan mereka.

Namun kompetisi antar keluarga bangsawan dan hubungan-hubungan dengan kekuatan asing juga menyebabkan terjadinya pasang surut kaum bangsawan dan seringkali munculnya keluarga bangsawan baru. Gelar-gelar bangsawan yang sangat khas seperti *Panglima* atau *Orang Kaya* ("Rang Kayo") hanya terdapat untuk bangsawan pantai (Padang) yang terbentuk dari pengalaman sejarah mereka dalam berhubungan dengan kekuasaan luar. Dalam hal ini khususnya dengan Aceh sebagai kekuatan utama yang menguasai monopoli perdagangan di pantai barat sebelum kedatangan Kompeni. Banyak kaum bangsawan di Padang dan juga di Pariaman yang menjalin hubungan kekuasaan dengan Aceh, yang mengangkat mereka sebagai "raja kecil" mewakili kekuasaan Aceh.

Setelah kekuasaan Aceh digantikan oleh Kompeni Belanda (sejak pertengahan abad ke-17, maka kaum bangsawan Padang umumnya tetap mempertahankan status mereka sebagai "raja-raja kecil" yang menjalin hubungan dengan Kompeni. Sampai abad ke-19 terdapat sekitar 24 orang di antara mereka yang diangkat Belanda sebagai "panglima", seperti yang pernah dimuat dalam koran Padang, *Nieuw*

Padangsch Handelsblad 23 Mei 1891. Kaum bangsawan ini menguasai hampir semua sumber ekonomi yang penting, terutama perdagangan dan menjadi pegawai Belanda.

Sementara itu, masyarakat pedesaan di pinggir kota, seperti Pauh, Koto Tangah, Kuranji dan Nanggalo yang mengelompok di pinggiran kota sampai ke kaki Bukit Barisan yang membatasi daerah pedalaman dan Padang masih relatif terpencil dari pengaruh kota. Hampir semua penduduknya terikat dengan pertanian, dan pengaruh kekuasaan bangsawan Padang juga tidak terlihat di sini. Bahkan sampai pertengahan abad ke-20 ini, penduduk desa di pingir kota itu tetap berada di luar jalur perkembangan perkotaan. Daerah hutan dan perbukitan di belakang desa ini mejadi basis pertahanan yang efektif Batalyon *Harimau Kuranji* dalam menentang Belanda pada masa revolusi 1945 dan juga pada masa PRRI tahun 1950-an. Bahkan sampai hari ini suatu organisasi masyarakat yang menamakan diri mereka dengan PAPIKO (Padang Pinggir Kota) mencerminkan kesadaran komunitas mereka sebagai bagian dari sejarah bersama (*common history*) dalam bentuk baru.

Administrasi Kolonial Belanda di Padang

Perubahan-perubahan wajah Padang dari coraknya yang lama sebagai dusun besar (*big village*) menjadi sebuah kota administratif Belanda tampaknya baru mulai sejak awal abad ke-20 ini. Sudah dikatakan di muka, bahwa pada awal abad lalu, penduduk Padang barulah sekitar 8.500 jiwa. Sampai pertengahan abad ke-19 Belanda masih terlibat dengan suasana peperangan dengan kaum Paderi di pedalaman. Karena itu hampir tidak ada yang dapat dikatakan tentang fasilitas kota, kecuali barak-barak militer dan kantor-kantor atau gudang semi-permanen.

Seperti dicatat oleh Nahuijs, seorang serdadu Belanda yang melancong ke Padang tahun 1820-an, "tempat ini" [dia tidak menyebut Padang sebagai kota] "hanyalah sebuah bandar kecil yang kurang penting". "Barangkali di sinilah pemukiman Eropa yang sangat tidak terurus, yang pernah saya kunjungi di Hindia... Dengan sejujurnya saya bisa mengatakan kepada anda, bahwa di sana saya

tidak menjumpai tiga buah rumah pun yang terawat dengan baik". Rumah-rumah orang Cina relatif lebih terurus. Tetapi di mana-mana bertebaran kuburan yang tidak terurus.[17]

Perubahan-perubahan perlahan, tetapi pasti mulai berlangsung sejak pertengahan abad ke-19 sejalan dengan mengalirnya arus pendatang baru ke Padang, khususnya pendatang Eropa. Kedatangan mereka membuat komposisi penduduk Padang semakin beragam. Mereka umumnya adalah serdadu kolonial dan sekaligus orang pemerintahan militer, para pegawai "gupernemen" yang masih amat terbatas jumlahnya itu. Sebagian di antaranya bekerja sebagai pegawai *Nerderlandsche Handeslmaatschappij* (NHM - Perusahaan Dagang pengganti VOC), yang sudah dibuka di Padang sejak tahun 1826. Kantor NHM di Padang itu adalah satu-satunya di luar Jawa.[18]

Lembaga-lembaga pemerintahan dan ekonomi Belanda, serta sekolah-sekolah Barat menjadi tulang-punggung kekuasaan kolonial. Sambil meneruskan usaha NHM (yaitu VOC versi baru), Belanda juga mendirikan apa yang disebut *Kamer van de Koophandel* (Kamar Dagang). Pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1892 sudah dibuka pula pelabuhan *Emmahaven* (Teluk Bayur), sejalan dengan rencana pembukaan tambang batu-bara Ombilin dan pada awal abad ini (1910) dibuka pula pabrik semen Indarung.

Dengan demikian sejak pergantian abad lalu, Padang merupakan salah satu dari pusat-pusat kegiatan ekonomi Belanda di Sumatra. Sementara Medan memainkan peranan penting karena hasil perkebunan tembakau di Sumatra Timur dan Palembang dengan industri minyaknya, Padang semakin penting sebagai pelabuhan ekspor batubara dan semen, di samping komoditi pertanian rakyat seperti kopra, karet dan beras.

Sejumlah firma (perusahaan) ekspor-impor internasional juga terdapat di sini. Kelompok perusahaan terbesar "The Big Five", membuka kantor cabangnya di Padang, seperti firma "Internatio",

[17] H.G. Nahujis, *Brieven over Bengcoolen, Padang, het Rijk van Minangkabau, Rhiouw, Sincapoera, en Poelo-Pinang* (Breda, 1926): 37-38.

[18] W.M.F. Mansveld, *Geschiedenis van de Nederlandsch Handel Maatschappij, 1824-1924. Jilid I* (Haarlem: J. Enschede, 1924): 51.

"Borsumij", "Geo-Wehry", "Gunzel & Schumacher", "Jacobson van den Berg" juga membuka cabangnya di Padang.[19] Selain itu, juga terdapat firma Belanda yang dipegang oleh Indo-Eropa seperti Firma Haacke, Firma Van outen Steffen, Veth dan Tels. Umumnya mereka bergerak dalam grosir barang-barang ekspor-impor keperluan rumah tangga dan juga di bidang penerbitan. Firma-firma besar dan kecil yang dimiliki oleh orang kulit putih, orang Cina atau pedagang kecil bumiputra mempercepat pertumbuhan pasar di Kota Padang.

* * *

Perubahan terpenting dalam sejarah pertumbuhan Padang sebagai kota administratif baru dimulai sejak awal abad ini ketika Padang resmi menjadi *Kotapraja (Gemeente)* sebagaimana tercatat dalam Lembaran Negara atau *Staatblad*, No. 151, 1 Maret 1906. Dengan status itu, pemerintahan kota memiliki hak mengurus rumah-tangga sendiri. Perubahan status yang baru itu menjadi penting, bukan saja karena diperkenalkannya pengaturan adminsitratif yang lebih bersunguh-sungguh, melainkan juga diperhatikannya pembangunan fasilitas kota seperti pelistrikan, *waterleiding*, prasarana dan sarana transportasi.

Sesungguhnya pada awal abad ke-20 itulah terbentuknya jati diri Padang sebagai kota, baik dilihat dari segi pemerintahan, maupun dari segi pertumbuhan penduduk dan fasilitas kota. Selama abad ke-19, penguasa kolonial di daerah ini sebetulnya tidak pernah membangun suatu sistem pemerintahan yang berdiri sendiri, kecuali sebagai bagian dari birokrasi pusat birokrasi Keresidenan Sumatra Barat dan sekaligus sebagai kota terminal bagi penyaluran hasil-hasil ekspor-impor ke dan dari pedalaman Sumatra Barat.

Bahkan selama dua dekade pertama sejak berdirinya *Gemeente* Padang (1906), pemerintahan kota masih dirangkap oleh Asisten Residen *Padangsche Ommelanden*, yang meliputi semua daerah dataran rendah pesisir dari utara sampai selatan. Itu berarti administrasi Padang masih digabungkan ke dalam birokrasi

[19] Lihat Colombijn (1995), hal. 58.

Keresidenan. Waktu itu Padang masih merupakan saah satu *onderafdeeling* yang terdapat di *Padangsche Ommelanden.*

Seperti halnya dengan setiap daerah *onderafdeeling,* yang biasanya dikepalai oleh seorang *coontroleur* (baca: kontrolir) kulit putih, Padang juga memiliki seorang *coontroleur,* mendampingi atau atasan dari pejabat tertinggi pribumi. Dalam hal ini di Padang berkuasa seorang *regent* (setingkat bupati) keturunan bangsawan Padang. Jabatan *regent* dihapuskan tahun 1910. Sejak itu delapan kampung berada langsung di bawah kontrol pejabat Belanda. Masing-masing kampung (*wijk*) — yang berasal dari kelompok *delapan suku* menurut struktur sosial Padang "tempo doeloe" — dikepalai oleh seorang Kepala Kampung. Kedelapan kelompok kampung tersebut masing-masingnya adalah sebagai berikut:

Wijk I	Kampung Mata Air dan Durian.
Wijk II	Kampung Purus, Damar, Olo, Ujung Pandan dan Kaluang.
Wijk III	Kampung Jawa, Sawahan, Belantung, Terandam dan Jati.
Wijk IV	Kampung Sebelah, Pondok, Kamp. Cina dan Belakang Tangsi.
Wijk V	Kampung Parak Gadang, Simpang Haru dan Andalas.
Wijk VI	Alang Laweh, Ganting, Ranah Binuang, Pasar Gadang, Kampung Nias dan Palinggam.
Wijk VII	Teluk Bayur, Air Manis, Seberang Padang dan Kampung Teleng.
Wijk VIII	Ulak Karang dan Nanggalo.

Setelah reorganisasi tahun 1913, pemerintahan *onder-afdeeling* Padang disederhanakan menjadi tujuh daerah distrik. Ketujuh distrik tersebut ialah: Tanah Tinggi, Batang Harau, Binuang, Koto Tangah, Pauh, Sungkai dan V Lurah. Masing-masing dikepalai oleh seorang kepala distrik (demang). Sebelumnya berada di bawah *gezag* Regent (Bupati). Regen yang terakhir adalah Tuanku Panglima Marah Uyub gelar Marah Maharaja Besar dan posisinya kemudian dihapuskan sejak 1910. Walaupun demikian, wibawa dan pengaruh keturunan regent Padang di mata masyarakat tetap dipertahankan

959.8
Zed
K.1
213/Hd/2011 - K I(I)

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Belanda.[20]

Kedua, dari sudut pertumbuhan penduduknya, Padang sejak awal abad ini mengalami pertambahan penduduk yang sangat pesat, mencapai sekitar 47.000 jiwa di atas kawasan seluas sekitar 11,5 ribu km2. Pertambahan penduduk dan perluasan jaringan pemerintahan pertama-tama berarti bertambah rumitnya urusan pemerintahan. Bagi pemerintah kota khususnya, ini merupakan sumber pemasukan pajak yang menguntungkan, yang sebelum 1906 masih ditentukan oleh Batavia. Dengan ditingkatkannya status Padang menjadi Kotapraja, maka Padang mulai memperoleh hak desentralisasi untuk mengurus rumah tangga sendiri termasuk keuangan, yang selama ini ditentukan oleh pusat.

Ketiga, dilihat dari fasilitas kota, seperti pasar, kantor-kantor pemerintah dan fasilitas umum serta media pers, meskipun sebagian sudah ada sebelumnya, tetapi semuanya itu mengalami perkembangan pesat sejak awal abad ke-20. Pasar-pasar yang tersebar di beberapa tempat membentuk kantong-kantong ekonomi kota sudah terbentuk sejak abad-abad sebelumnya dan sampai awal abad ini, setidaknya terdapat sekitar lima buah pasar tempat transaksi jual-beli yang dikunjungi penduduk kota. Yang tertua adalah *Pasar Gadang*, terletak tidak jauh dari Muaro sebagai pusat kota lama. Di sepanjang *Handelskade* (jalan Batang Arau) sampai ke Pasar Gadang terdapat agen-agen grosir, gudang-gudang perusahaan dan kantor pemerintah. Di sini umumnya pedagang kulit putih lebih dominan.

Selain itu ada lagi *Pasar Mudik*, terletak lebih ke dalam atau arah selatan Pasar Gadang, sudah ramai sejak abad ke-19. Aktivitas pasar dikuasai oleh orang pribumi dan juga Cina. Di sini terdapat agen perusahaan bumiputra bernama "Badu Ata & Co".[21] Pedagang besar terkenal di sini ialah Mohammad Taher, yang kemudian juga menjadi anggota Dewan Kotapraja Padang. Berikutnya *Pasar Tanah Kongsi* di Kampung Cina, dan yang keempat adalah *Pasar Belakang Tangsi*.

[20] Rusli Amran (1988), hal. 335.

[21] Adrial Adhli, "Perdagangan Hasil Bumi Sumatra Barat di Padang, 1900-1930," (Tesis Pascasarjana UGM, 1994), hal. 129.

Pasar ini habis terbakar tahun 1882,[22] tetapi kemudian dibangun lagi oleh pedagang Cina Gho Lam San. Pada awal abad ini, sebuah pasar yang baru dibangun di tengah Kampung Jawa oleh seorang cukong Cina bernama Lie Maa Saay kemudian dikenal *Pasar Kampung Jawa.*

Perangkat lembaga *gupernemen* dengan semua instansi-nya, seperti kantor Asisten Residen, *Departement Landbouw, Nijverheid en Handel* (Deperteman Pertanian, Industri dan Perdagangan), *Kamer van Koophandel* (Kamar Dagang), *Raad van Justitie* (Lembaga Peradilan), *Schout Politie* (Kepala Polisi), PID (*Politie Inlichtingen Dienst* - Intelijen Belanda) dan pembentukan bank-bank pemerintah dan swasta barulah merupakan gejala abad ke-20.[23]

Selanjutnya perluasan pekerjaan administratif berarti terbukanya peluang pekerjaan baru sebagai pegawai, di samping pelbagai jenis pekerjaan lain sehubungan dengan pemekaran kota. Kekurangan akan tenaga pegawai yang terdidik tampaknya merupakan gejala akut sejak abad lalu. Dalam tahun 1820 di Padang di antara sekitar 300 orang kulit putih, mayoritas adalah tentara dengan segelintir pegawai sipil dan pedagang.[24] Berulangkali Gubernur Michiels tahun 1840-an mengeluh ke pusat sehubungan dengan kurangnya tenaga pegawai terdidik. Tetapi yang datang hanya satu dua *klerk* atau pegawai *commies* dan seringkali tidak memuaskan. Di antara rombongan ini terdapat E. Dewer Dekker (Multatuli), yang kemudian dikenal sebagai penulis novel yang masyhur itu. Dia juga bermasalah di Padang, sehingga dipindah-tugaskan.[25]

---

[22] *Ibid.*

[23] Pada tahun 1915 misalnya, terdapat sekitar 543 bank yang tersebar di Sumatra Barat dan terbanyak di Padang. Lihat data Akira Oki (1977:48ff).

[24] Pada tahun 1820-an jumlah pegawai kulit putih (Belanda) di Padang hanya 27 orang dan sebanyak 263 tentara, ditambah 393 tentara pribumi (KNIL). Angka itu tidak mengalami perubahan yang berarti tahun 1837, yakni sebanyak 5 orang untuk seluruh Sumatra Barat, di antaraya 12 orang di antaranya di Padang. *Regeerings Alamanak van Ned.Indie* 1837 (Batavia: Landsdrukkerij, 1838): 48, 198-200.

[25] Dalam novelnya yeng terkenal itu, *Max Havelaar, atau Lelang kopi NHM* (terbit pertama tahun 1860, kemudian juga diterjemahka ke edisi Bahasa Indonesia, 1968), Multatuli a.l. menceritakan pengalamannya di Padang. Ia dihukum Gubernur karena membongkar laporan keuangan kontrolir Natal. Beberapa hari ia tidak diberi makan hingga membuatnya mencuri kalkun Gubernur. Lihat Paul van 't Veer, *Het Leven van*

Tetapi sejak abad ke-20 kelompok pedatang baru mengalir terus. Mereka umumnya terdiri dari kaum profesional dari pelbagai bidang. Kecuali pegawai dan tentara, juga bekerja sebagai usahawan, bankir, penambang, wartawan, pendeta dan pendidik, serta petualang yang tinggal secara berkala, atau tidak permanen. Gejala urbanisasi ke Padang sejalan dengan semakin terbukanya kesempatan bekerja dalam birokrasi pemerintah, sistem pasar dan mereka yang ingin masuk sekolah-sekolah kolonial.[26]

Tidak kurang pentingnya ialah bahwa pola pemukiman di Kota Padang, seperti halnya dengan kota-kota kolonial umumnya, mengelompok menurut garis rasial. Pengelompokkan pemukiman membentuk pola kantong, di mana lokasinya ditentukan berdasarkan ras dan kedekatan hubungan mereka dengan penguasa. Dalam hal ini Orang Eropa (kulit putih) adalah warga kelas satu, yang menempati puat kota dan yang memperoleh lebih banyak fasilitas kota. Di bawahnya Timur Asing (Cina, Jepang, India dan Arab. Sesudah itu menyusul rakyat bumiputra warga kelas tiga. Dengan sendirinya daerah pusat kota didominasi oleh masyarakat kelas satu (Eropa) yang berpusat di sekitar tugu Michiels, dekat Taman Melati sekarang dan kemudian menyebar ke Jalan Belantung (Jalan Jend. Sudirman sekarang).

* * *

Dengan meningkatkan jumlah penduduk dan golongan masyarakat kota, pemerintahan kolonial merasa perlu untuk membentuk Dewan Kotapraja (*Gemeeneteraad*). Yaitu semacam dewan perwakilan rakyat yang pura-pura, di mana wakil-wakil golongan bumiputra dan Cina diberi kursi atau hak suara secara di dalam Dewan. Wakil-wakil golongan ini sewaktu-waktu dipanggil mengadakan sidang dan bertemu untuk membicarakan masalah-masalah kemaslahatan bersama, seperti soal pajak, masalah dan masalah-masalah keamanan umum.

Mulatuli (1979): 171-77.

[26] Mestika Zed, "Pendidikan Kolonial dan Masalah Distribusi Pengatahun", *Jurnal Sejarah* (MSI Pusat), Th. I, No. 1 (1991).

Namun begitu, Dewan itu tidak bisa disamakan dengan DPRD yang merdeka, karena ia lebih mewakili kekuasaan pemerintah dan bukan mewakili kepentingan rakyat. Hal ini tercermin dari komposisi anggotanya, dan juga dari program dan issu-issu yang dibicarakan di dalamnya. Komposisi anggota Dewan Kotapraja Padang, misalnya, jelas-jelas mencerminkan kekuasaan pemerintah dan orang-orang yang bisa "bekerja sama dengan penguasa. Pada awal berdirinya (1906) jumlah anggota Dewan ada 19 orang, dengan rincian masing-masingnya terdiri dari 13 orang wakil Eropa, 2 Cina dan 4 wakil bumiputra.[27] Jadi, meskipun mayoritas penduduk Padang adalah bumiputra, wakil-wakil mereka paling sedikit jumlahnya. Sebaliknya kelompok minoritas orang kulit putih sebagai golongan yang berkuasa, paling besar jumlah anggotanya di dalam Dewan.

Siapakah orang-orang yang duduk sebagai anggota Dewan Kotapraja Padang? Wakil-wakil Eropa umumnya adalah para pedagang besar dan pegawai kulit putih. Sementara dari kalangan Timur Asing (khususnya Cina) terdiri dari wakil kelompok pedagang Cina kaya dan kelompok Cina biasa. Wakil-wakil Indonesia umumnya terdiri dari para kepala "tradisional" atau bangsawan yang dekat hubungannya dengan *Regent* (Bupati) Padang dan sebagian pegawai. Akan tetapi pada prinsipnya mereka mencerminkan gejala nepotisme, karena para pegawai dan orang-orang berpendidikan dari generasi pertama di dalam Dewan adalah keluarga bangsawan juga. Lagi pula sampai tahun 1917, semua anggota masih diangkat oleh pemerintah. Jadi bukan lewat pemilihan. Sudah pasti tokoh pergerakan tidak mungkin masuk ke dalam Dewan. Paling tidak ini berlangsung selama dua dekade pertama.

Sekitar sepuluh tahun pertama terdapat sedikit perubahan komposisi anggota Dewan. Jumlah wakil Eropa dikurangi menjadi 10 orang saja, Cina tetap 2 orang dan wakil bumiputra bertambah menjadi 5 orang wakilnya. Namun anggota Dewan dari kelompok

[27] *Verslag van de Gemeente Padang*, 1906-1918 (Padang: Baumer, 19919); Colombijn (1975), hal. 270.

kulit putih yang umumnya adalah wakil-wakil penguasa dan pengusaha besar Eropa masih tetap dominan. Bahkan sampai tahun 1928 Dewan Kotapraja Padang masih dipimpin langsung oleh Asisten Residen. Jadi sampai tahun itu Padang belum memiliki walikota.

Bagaimanapun, pembentukan Dewan Kotapraja sejak tahun 1906 merupakan loncatan kamajuan dalam pemerintahan kota. Kehadiran Dewan itu secara formal memberikan hak otonomi atau desentralisasi bagi pemerintahan kota dengan mengikutsertakan wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan. Dewan itu telah memainkan peran sentral dalam lintasan hubungan antara penjajah dengan yang dijajah. Pemerintahan kota lebih maju setapak ketika diangkatnya Walikota Padang yang pertama, yaitu W.M. Owerkerk. Pengangkatan Walikota berlangsung pada tanggal 23 November 1928, hanya satu bulan setelah organisasi nasionalis di Jakarta pertama kali mengikrarkan persatuan Indonesia lewat "Sumpah Pemuda" yang amat bersejarah itu.

Sesuai dengan sifatnya, Dewan Kotapraja diciptakan untuk kepentingan pemerintah dan bukan untuk warga kota. Maka tidaklah mengherankan, bahwa issu-issu utama dalam Dewan, tentu saja, berkaitan dengan masalah pajak, anggaran belanja dan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan pengendalian warganya untuk politik *rust en orde* (ketertiban dan keamanan) pemerintah.

Sumber keuangan yang utama ialah dari berbagai jenis pungutan pajak seperti "pajak rodi" (*rodigelden*) dan restribusi pelbagai macam usaha, seperti pajak pertunjukan (bioskop, sepak-bola dll.) dan subsidi. Beberapa macam sumber pajak terus diusahakan seperti bermacam jenis pajak pendapatan atau pajak kekayaan dan pelbagai pajak negara yang sebelumnya jatuh ke pusat.

Karena pemerintah kolonial tidak pernah bermaksud untuk menyejahterakan rakyat jajahan, melainkan sekedar mendapatkan keuntungan bagi pejabat dan negeri-induk (Belanda), maka peraturan perundang-undangan cenderung memihak kepada penguasa. Untuk mendapatkan sumber bermacam jenis pajak, maka seni mendayagunakan potensi yang ada diusahakan dengan begitu

cerdik. Sebagai contoh misalnya, dalam tahun 1907, pemungutan pajak dari usaha "potong ternak" yang sebelumnya diusahakan oleh Orang Cina diambil-alih oleh pemerintah dengan alasan tidak memenuhi persyaratan kesehatan.[28]

Sepuluh tahun kemudian bermacam jenis pajak terus berkembang dengan diambil-alihnya pajak pasar dari tangan swasta kepada pemerintah. Begitu juga dengan pajak listrik dan air minum, di samping pelbagai jenis pajak terus diupayakan sedemikian rupa. Sebagai contoh, seekor ternak yang akan masuk "rumah potong" dikenai beberapa kali pajak, sejak penjualan dari pemiliknya, masuk pasar, pajak jual-beli, pajak masuk rumah potong dan seterusnya. Begitu juga pada masa kolonial, aliran barang-barang ekspor-impor berlangsung melalui rentetan yang panjang. Semuanya berlangsung dalam jaringan redistribusi yang esktensif. Firma-firma eskpor-impor yang berada di bawah pengawasan *Kamer van de Koophandel* di Padang merupakan pusat utama dari redistrubusi perdagangan di Sumatra Barat dan Tapanuli.

Perluasan jaringan usaha berarti sumber pemasukan pajak bagi pemerintah. Selama sepuluh tahun pertama berdirinya Dewan Kotapraja, debat-debat anggota Dewan selalu menjurus ke soal pajak dan perencanaan tata-kota. Salah seorang wakil anggota pribumi di dalam Dewan ialah Mahjoedin Dt. Sutan Maharadja, tokoh konservatif dari Kaum Tua, tetapi dia sebetulnya adalah tokoh Kaum Muda sejak awal abad ini. Diangkat menjadi anggota Dewan pada tahun 1909, ketika dia masih simpatisan gerakan Kaum Muda dan tetap menjadi anggota sampai meninggalnya tahun 1921. Ketika sistem *Regent* (bupati pribumi) dihapuskan tahun 1910, dia semakin condong ke kubu Kaum Tua, meskipun tidak pernah melepaskan keanggotaannya dalam gerakan Kaum Muda.

Namun Datuk St. Maharadja adalah tokoh konservatif pendukung kekuasaan kolonial. Sebagai contoh misalnya, di dalam Dewan dia pernah mengusulkan agar pemerintah Kotapraja menyediakan dana untuk merayakan kemerdekaan Belanda sejak

[28] *Ibid.*

Perang Napoleon.[29] Pandangannya ini membuat wakil Belanda yang progresif di dalam Dewan seperti Z.H. Kamerling, menganggap Datuk yang satu ini tidak mewakili rakyat bumiputra, melainkan menyuarakan dirinya sendiri dan keberpihakannya dengan penguasa kolonial. Kurenah Datuk telah menimbulkan protes dari masyarakat, umumnya dari kalangan Kaum Muda, agar memecat Datuk dari keanggotaan Dewan. Tetapi Datuk juga tidak membawakan suara Kaum Tua di dalam Dewan, apalagi untuk Kaum Muda, yang memang tidak memperoleh kursi di sana.

Sejak tahun 1918, anggota bumiputra di dalam Dewan dipilih berdasarkan kelompok sosial yang diwakilinya. Salah seorang politikus brilian ialah Noerdin Rasad, seorang tokoh Sarikat Islam. Barangkali karena kurang disenangi oleh anggota kulit putih, maka dia pernah dideskreditkan, sehingga didemonstrasi oleh pedagang-pedagang sayur di Kampung Jawa karena diissukan ikut mendorong kebijakan pemerintah kota untuk memindahkan tempat jualan mereka ke los sayur yang lebih kecil. Issu ini kabarnya berasal dari wakil Belanda di dalam Dewan, tetapi Noerdin Rasad tidak mau angkat bicara menggunakan hak-jawabnya.[30]

Anggota bumiputra yang lain ialah Roestam St. Palindih, redaktur majalah *Radio*. Yang lainnya, Rustam Effendi, yang bergabung dengan Dewan sejak 1926. Dilahirkan di Padang tahun 1903, sehari-harinya dia bekerja sebagai guru dan reporter sebuah surat kabar. Anggota Dewan yang relatif lama menduduki kursi Dewan Kotapraja selain M. Dt. St. Maharadja (1909-1921), Soetan Radja glr Masa Boemi (1909-1925) dan dr. Abdul Hakim (asal Tapanuli Selatan), *ketua Sport Vereeniging Minangkabau*, yang juga menjadi guru Adabiah menduduki kursi Dewan dalam dua periode (1921-34; 1938-1942).

Sedang wakil-wakil dari kelompok masyarakat Jawa misalnya Ir. Mas Hoedioro; wakil kelompok Cina seperti Lie Sim Tjoan (1906-18), Lie The Thay (1913-26). Dalam perdebatan Dewan kelompok Cina adakalanya berkoalisi dengan bumiputra. Misalnya ketika Yap Gim

[29] *Ibid.*

[30] *Sinar Sumatra*, 22 Oktober 1920.

Sek, editor *Sinar Sumatra*, yang mewakili kelompok Cina dari kalangan biasa (bukan Cina kaya) mendukung usul anggota Dewan Mohammad Taher, seorang pedagang besar di Pasar Mudik, yang menolak penerapan pajak kepala sebagai pengganti pajak rodi. Sementara wakil Belanda sebaliknya mendukung sepenuhnya.[31] Walhasil, yang menang akhirnya suara mayoritas dalam Dewan.

Pada prinsipnya debat politik tidak memperoleh tempat di dalam Dewan. Lagi pula, semua wakl-wakil Indonesia yang duduk di dalamnya bukanlah politisi, melainkan wakil-wakil golongan masyakarat yang "moderat", dalam arti lebih mengutamakan keharmonisan dan menerima kekuasaan kolonial sambil memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat yang diwakilinya. Juru bicara kelompok ini dapat ditemukan dalam kelompok kaum adat dan kaum ulama "tradisional", yang disebut Kaum Tua. Datuk St. Maharadja mulanya adalah pemimpin Kaum Muda. Namun karena gerakan Kaum Muda semakin vokal dalam menyuarakan gerakan reformasi, sementara ia enggan kehilangan posisinya dalam Dewan, ia lalu bergabung dengan kelompok Kaum Tua.

Selama dua dekade pertama, di Sumatra Barat berkembang perdebatan antara Kaum Tua versus Kaum Muda di bidang keagamaan dan masalah sosial. Tetapi sejak meninggalnya Dt.St. Maharadja pada tahun 1921, pamor Kaum Tua kian menurun. Sebaliknya Kaum Muda semakin mendapat tempat di hati masyarakat, terutama setelah mengadopsi gagasan komunis-Islam yang berpusat di Padang Panjang. Lebih revolusioner dan memiliki daya tarik luar biasa di kalangan orang kebanyakan seperti kaum buruh dan petani, gerakan komunis-Islam yang berpusat di sekolah *Sumatra Thawalib* Padang Panjang, juga memiliki jaringan pergerakan di Padang. Mereka juga memiliki pengaruh ke dalam Dewan.

Dalam hal ini, masuknya Roestam Efendi sebagai anggota baru Dewan Kotapradja pada tahun 1926, bersamaan dengan pasang naik pergerakan kaum komunis (PKI). Tokoh ini memberi warna

[31] *Sumatra Bode*, 13 April 1907.

tersendiri terhadap suara kaum pribumi dalam Dewan karena dialah orang pertama yang berani bicara secara lantang tentang persoalan-persoalan yang lebih fundamental. Khususnya mengenai sistem pemerintahan kolonial yang cenderung menganaktirikan orang Indonesia dalam kebijaksanaan pemerintahan. Meskipun tidak secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai orang komunis, paling tidak dia adalah simpatisan aliran ini.[32]

Pemberontakan kaum komunis yang gagal tahun 1927, berpengaruh besar terhadap tindakan pemerintah terhadap semua partai-partai politik, termasuk orang-orang pemerintahan dan angota Dewan. Roestam Effendi jelas simpatisan komunis, tetapi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memecatnya sebagai anggota Dewan. Setelah pemberontakan itu dia kecewa dengan cara pemerintah menangani kasus pemberontakan di Sumatara Barat, sehingga atas kemauan sendiri keluar dari anggota Dewan.

Tetapi meskipun semua wakil Indonesia dalam Dewan Kotapraja Padang itu dianggap "bersih" dari pergerakan politik, kebanyakan mereka sebetulnya mendapat inspirasi dan membina hubungan dengan tokoh-tokoh nasionalis asal Sumatra Barat yang duduk dalam *Voksraad*, seperti H. Agoes Salim, Mohammad Yamin dan jelas juga dengan Abdoel Moeis, tokoh yang kemudian lebih dikenal sebagai penulis novel (a.l. *Salah Asuhan*) daripada politikus kawakan.[33] Setelah mundur dari kepemimpinan pusat Sarekat Islam, dia kemudian lebih mencurahkan perhatian terhadap pergerakan di daerah. Antara tahun 1923-24 dia pernah berada di Padang untuk memberikan bantuan kepada rakyat di daerah itu guna mempertahankan hak-hak pemilikan tanah rakyat yang diambil-alih oleh pemerintah untuk disewakan kepada rakyat.[34]

Puncak ketidakpuasan rakyat terhadap kesewenang-wenangan

---

[32] Colombijn (1995): 280.

[33] Abdoel Mois lahir (3 Juli 1878) di Sungai Puar, Bukittinggi. Dalam dekade kedua abad ini dia adalah salah seorang dari tiga tokoh utama dalam Partai Sarikat Islam Pusat, bersama H.O.S. Tjokroaminoto dan H.A. Agus Salim, yang menentang infiltrasi komunis ke dalam partai itu.

[34] J. Th. Blumberger, *De Nationalistische Beweging in Nerderlandsch-Indie* (Haarlem: Tjeenk en Willink & Zoon, 1935), hal. 79.

pemerintah kolonial mencapai klimaksnya lewat pemberontakan yang meletus di Silungkang dan pada umumnya juga di seluruh daerah Sumatra Barat pada awal 1927. Aksi-aksi serupa juga menjalar ke Padang. Di kota ini gerakan komunis yang bergerak di bawah "Sarekat Djin", merencanakan aksi pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan sekitar 40 buah bom ditemukan. Sejak itu, penguasa Belanda di seluruh Indonesia menghapuskan semua partai politik dan kontrolnya terhadap kegiatan kaum pergerakan semakin diperketat.

Namun demikian, penguasa kolonial sebetulnya tidak pernah benar-benar dapat "membersihkan" sentimen nasionalisme Indonesia di dalam Dewan. Salah seorang anggota Dewan yang paling kritis ialah Roestam Soetan Palindih. Dia editor majalah *Radio*. Diangkat menjadi anggota Dewan dalam periode 1933-1938. Barangkali dialah politikus yang memiliki pandangan strategis dan analitik di dalam Dewan. Berbeda dengan kebanyakan rekan-rekan Indonesia yang lain, yang cenderung memelihara keharmonisan dengan penguasa, dia tidak takut konflik. Dialah yang sanggup menyatakan pendapatnya tanpa merasa sungkan akan perbedaan.

Menyadari akan posisinya yang lemah sebagai wakil minoritas Indonesia di dalam Dewan, dia berbicara lantang tentang pajak dan pelbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. "Tujuan saya", ujarnya, "adalah untuk kebaikan bersama". Menurut pandangannya, setiap kelompok menanggapi konflik pendapat dengan cara dan arti yang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin untuk menemukan kepentingan bersama yang universal. Semua keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas dan karena itu setiap kelompok berusaha untuk memperoleh suara mayoritas.[35]

Karena itu, dia menghendaki agar anggota Dewan sebaiknya jangan dikelompokkan berdasarkan hirarki rasial atau ideologis, melainkan atas dasar kepentingan kelompok dengan membentuk *fractie*. Wakil Indonesia seharusya membentuk *fractie* untuk berkoalisi dengan siapa saja guna memperoleh suara mayoritas. Ini juga dimungkinkan karena sejak tahun 1930-an wakil kulit putih di

[35] *Soematra Baroe*, 19 Februari 1937.

dalam Dewan, berbeda dari kelompok Indonesia, mewakili sejumlah partai, yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.[36] Mereka adakalanya memiliki kepentingan yang sama dengan rekan Indonesia mereka, dalam hal ini, khususnya kepentingan ekonomi.

Depresi tahun 1930 memukul pengusaha Indo. Tidak seperti orang Eropa *totok*, posisi mereka relatif lemah karena berpendidikan relatif rendah dan karena itu relatif sulit untuk mendapat posisi yang baik di pemerintahan. Juga berbeda dengan orang Indonesia, mereka tidak memiliki tanah untuk memenuhi kebutuhan subsistensi mereka. Akibat Depresi 1930 memaksa Partai *Indisch-Eurpeesch Verbond* (IEV), yaitu partainya orang Indo mengambil tindakan. Kelompok IEV di dalam Dewan memunculkan agenda debat tentang issu-issu yang menguntungkan *the man-in-the-street* (orang kebanyakan) seperti soal pajak dan biaya perumahan, gaji pegawai, kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja.

Issu-issu yang dilontarkan kelompok IEV di depan Dewan tampaknya mendapat dukungan dari wakil-wakil pribumi, seperti Roestam St. Palindih dan juga dari wakil-wakil kelompok Cina. Dengan demikian tercipta koalisi baru ke dalam *fractie-fractie*, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ide itu segera mendapat tangapan karena ia juga menyangkut kepentingan pedagang kecil. Lebih-lebih lagi karena krisis ekonomi di awal 1930-an memaksa banyak pedagang kecil ke luar dari dunia bisnis di Kota Padang. Kebanyakan mereka merasa tidak lagi mampu bertahan di kota dan memutuskan pulang ke kampung mereka untuk kembali hidup bertani memenuhi kebutuhan subsistensi dengan mengerjakan tanah keluarga.[37]

Sebagai tanggapan terhadap tekanan ini, maka perkumpulan para pedagang lokal memperkuat organisasi-organisasi mereka, misalnya dengan mendirikan bank-bank sendiri, seperti *Bank Nasional* yang didirikan oleh Anwar Sutan Saidi tahun 1930.[38] Dengan bantuan bank ini, pedagang-pedagang Minangkabau

[36] Paling tidak ada tiga kelompok partai orang Belanda yang masuk Dewan: *Vaderlandsche Club* (VC), *Indische Katholik Partij* (IKP - Partai Katolik Hindia) dan *Indisch-Europeesche Verbond* (IEV - Partai Persatuan Indo-Eropa), Colombijn (1995): 281.

[37] Kahin (1997): 18.

[38] *Propinsi Sumatera Tengah* (tanpa tahun, c. 1954), hal. 754-55.

akhirnya mampu mendirikan P.T. *Inkorba* (Inkoops Organisasi Batik), suatu perusahaan impor yang didirikan tahun 1935 dan tiga tahun kemudian terdaftar sebagai N.V.[*Naamloze Vennootschap*].

Dalam tahun 1938 cabang "Himpunan Saudagar Indonesia" di Padang (yang didirikan pada tahun 1916 dengan nama *Saudagar Vereeniging*) membuat persetujuan kontrak dengan *Inkorba* yang bertindak sebagai satu-satunya sebagai penyalur semua barang impor di Padang. Jadi bukan lagi lewat makelar-makelar Cina sebagai agen Belanda seperti yang terjadi sebelumnya. Sejak itu, para pedagang Minangkabau mengambil alih perdagangan gambir dari Cina di daerah ini. Persatuan Saudagar Minangkabau juga

Dalam tahun 1934 misalnya, laporan Jepang mengatakan bahwa pedagang-pedagang Minangkabau menguasai seluruh perdagangan katun dan pendistribusian bahan baku tekstil.[39] Sementara itu, wakil-wakil pribumi di dalam Dewan semakin memantapkan koalisi mereka untuk membela nasib ekonomi warga kota. Pengganti Roestam, yaitu Abdoel Madjid Usman yang masuk ke Dewan sejak 1938 adalah tokoh yang lebih bermutu. Menamatkan pendidikannya di Meiji University, Tokyo (1930-1936), dia kemudian pulang ke Padang bersama isterinya seorang wanita Jepang, dan aktif dalam Dewan. Lebih progresif ketimbang pendahulunya, Abdoel Madjid Usman menggunakan bahasa "Indonesia" (dan bukan bahasa Melayu) dalam pidatonya dalam Dewan, yang membuat wakil-wakil kulit putih kebakaran jenggot. Serangannya terhadap penghapusan *rodigelden* (uang rodi) dan tuntutan agar lebih banyak wakil Indonesia dalam Dewan semakin menyeret debat di dalam Dewan ke arah politik pergerakan, yang sedang berkembang dalam masyarakat.

Menjadi jelas, bahwa menjelang kejatuhan Belanda, Abdul Madjid Usman telah berada di tengah-tengah ancaman politik kolonial yang semakin menindas, yang kemudian menyeretnya ke dalam penjara. Sebagaimana yang akan dilihat pada bagian berikut ini, dia hanyalah salah seorang korban dari penindasan politik Belanda terhadap kaum pergerakan di daerah ini, sejalan dengan

[39] Akira Oki, "Social Change ...." (1977), hal. 171.

bangkitnya partai-partai nasionalis agama radikal di Sumatra Barat.

Kaum Pergerakan Bumiputra

Dalam tahun 1930-an, periode ketika tekanan politik kolonial terhadap pergerakan politik bumiputra amat menjadi-jadi, koran Belanda yang terbit di Padang, "Sumatra Bode", 8 Agustus 1936, menulis *headline* (halaman muka) berbunyi, "...politik partai-partai mulai menggelinding ...!" Sebenarnya yang dieskpos koran itu bukanlah kelahiran partai-partai politik itu sendiri, melainkan mencuatnya kembali debat politik publik, baik di dalam koran maupun dalam lembaga pendidikan dan di kalangan anggota Dewan Kotapraja Padang, setelah semua partai-partai diberangus penguasa dan setelah tokoh-tokoh utama kaum pergerakan Sumatra Barat ditangkap dan dibuang ke Digul.

Memang, politik kaum pergerakan di Sumatra Barat mencapai puncak kematangannya dalam tahun 1930-an itu. Berbagai aliran partai politik, sekolah dan organisasi profesi jalin menjalin dalam menggalang pengikutnya di lingkaran warga kota dan menghidupkan gerakan anti-pemerintah kolonial secara lebih sistematik. Mereka sedang memainkan politik tingkat tinggi. Bukan dengan jalan kekerasan, juga bukan dengan rapat-rapat terbuka (*openlucht vergadering*) yang telah dilarang beberapa tahun sebelumnya, melainkan pencerahan kesadaran politik lewat wacana intelektual seperti lembaga pendidikan, lewat perkumpulan sosial dan oraganisasi dagang dan lewat koran.

Meskipun penguasa Belanda pada saat yang sama telah melakukan penindasan secara sistematik terhadap setiap kegiatan pergerakan bumiputra yang berbau politik, dan menangkap setiap orang yang dicurigai, sentimen nasionalisme antikolonial tidak mudah dihapuskan begitu saja. Kebanyakan kaum terpelajar kota telah tercerahkan ke dalam spirit nasionalisme Indonesia, yang menguasai jiwa zaman pada waktu itu. Nilai-nilai kemajuan tidak muncul tiba-tiba begitu saja dan juga tidak melulu gejala lokal di Sumatra Barat belaka. Meskipun demikian di Sumatra Barat gaungnya lebih lantang dan menjangkau ke berbagai lapisan

masyarakatnya sampai ke desa-desa. Akar-akarnya sudah muncul sejak awal abad ini, berasal dari dua jurusan yang berbeda. Pertama pengaruh nilai-nilai baru dari dunia Barat dan yang lain dari dunia Islam di Timur Tengah.

Sekitar pergantian abad ke-19 dan ke-20, sebagian kaum bangsawan Padang dan para pegawai bumiputra telah menyerap nilai-nilai baru dalam kehidupan individual dan sosial. Hal itu antara lain tampak dari gaya hidup sehari-hari dan perkumpulan-perkumpulan (club sosial) gaya Belanda. Dalam hal ini, misalnya, dapat dilihat dari cara berpakaian dan menjadi pelanggan surat kabar. Catatan seorang pelancong di awal abad ini melukiskan selera publik di Padang dan di kota-kota lain di Sumatra Barat.

Masa dahulu, 10 tahun ke belakang memang keinginan makan gajih, terutama jadi *ambtenaar* itu luar biasa sekali, hingga masa itu kuatir orang kalau-kalau saudagar-saudagar yang tua, yang selama ini mempertahankan dagang dan usaha bumiputra meninggal dunia, tidak ada gantinya lagi didapat dari pemuda (*jonge generatie*) karena semua asyik menjadi orang hendak berpangkat, jadi *djoeroetoelis*, atau lain pekerjaan yang berukuran pendapatannya. Demikian pun di kalangan tani.

> Memang,... perawan-perawan pun lebih menyukai seorang *djoeroetoelis* dari pada seorang saudagar, meskipun diketahuinya nyata yang saudagar itu berpenghasilan lebih dari djoerortulis Djaksa yang tjoema berpendapatan f.15 seboelan itoe". Kaum pegawai djoeroetoelis juga mendapat panggilan lebih tinggi [terhormat] yaitu "Engkoe"....
>
> Heran kita mengapa begitu!
>
> Konon kecil saja sebabnya, bisa membuat orang tertawa. Sebenarnya lantaran *pakaian* dan pikiran pada masa itu. Sepuluh atau 15 tahun dahulu, pakaian yang praktis seperti *pentalon* (setelan) itu ada menjadi monopolinya ambtenaar atau orang yang makan gajih di *kantoor* Belanda. Seorang saudagar, biarpun wangnya banyak, tapi tidak berani ia memakai pentalon, meskipun sebenarnya pakaiannya ... lebih mahal harganya karena sepasang jas dan pentalon cuma f 10 sampai f 11, sementara kain Boegis saja berharga sampai f 40, celana batik f 6 dan bajunya pun dari kulit kayu yang mahal-mahal.
>
> Tapi meskipun semahal itu pakaian saudagar, harganya di pasar

> pergaulan jauh jua lebih tinggi pakaian pentalon tadi. Jika si saudagar tadi memakai pentalon, orang anggap tidak pantas, sebab pakaian serupa itu pakaian orang kantor..... Dan orang yang berpakaian kantor inilah yang paling "laku" di pasar perawan-perawan.[40]

Pengaruh gaya hidup pegawai juga menular dengan cepat kepada para saudagar. Sekitar awal abad ini orang masih menjumpai pemandangan di Pasar Gadang di mana rata-rata saudagar dan "tauwke" bercelana batik, berkemaja pendek atau berbaju kaus, dengan kaki telanjang, seperti "chettij" (pedagang rentenier) di Medan, meladeni pembeli ke tokonya. Tetapi pada dekade kedua abad ini saudagar muda bepakaian "netjis" dan mengatur tokonya dengan gaya Eropa. Salah seorang pedagang pribumi seperti Tuan Daoed Kari Sutan termasuk saudagar muda yang "revolitionair" dalam mengubah gaya hidupnya. Dia tidak lagi memperlihatkan pusatnya ke muka umum, juga sudah memakai pentalon seperti pakaian pegawai. Bagitu juga pengaturan perabot rumah mereka pun mulai ditata menurut cara Barat. Mereka mulai menyenangi duduk di kursi dan bukan bersila, berlangganan surat kabar, memiliki koleksi buku, menggantungkan "helmhoed" (topi helm) atau topi panama di kapstok di dalam rumah.[41]

Memang, beberapa tahun sebelum tahun 1900 "orang soedah bersoerat kabar di sini". Dalam hal persuratkabaran, Padang barangkali tidak ada tandingannya dengan kota manpun di Sumatra, juga tidak di Jawa, di mana surat kabar telah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang berfikiran lebih "maju". Dari sejumlah surat kabar yang diterbitkan di Padang sejak pergantian abad ini sampai dekade kedua abad ke-20, seperti *Pertja Barat, Sinar Sumatra, Insoelinde, Warta Berita, Pelita Ketjil, Bintang Tionghoa* dan lain-lain ada dua di antaranya yang termaju. Koran bumiputra, yaitu *Pertja Barat* ditangani oleh Dja Endar Muda, tamatan "Sekolah Raja" (atau *Kweekschool*) Bukittinggi, seperti juga penggantinya kemudian, Kamaroeddin adalah tamatan Europesche School, sedang *Sinar*

[40] Parada Harahap (1926), hal. 91-92 [cetak miring dari saya].

[41] *Ibid.*

Sumatra pada tangan orang Tionghoa.

Ontwikkeling (kecerdasan) para jurnalis pada masa ini tidak ketinggalan dengan rekan-rekan mereka di Jawa. Perdebatan intelektual mengenai "kemajuan', adat dan agama serta tradisi sejarah dan ekonomi diminati pembacanya. Jurnalis terkemuka, untuk menyebut seberapa di antaranya, seperti Dja Endar Muda, Ibrahim Datoek Soetan Maharadja, Dt. S. Soetan Nan Gadang, Dja Endar Boengsoe, Sampono Diradjo dan sejumlah jurnalis Tionghoa seperti Liem Soen Hin, Lee Goan Ho, tidak perlu diragukan lagi mutunya. Dari tahun ke tahun pembaca koran di Padang bertambah naik dan isinya mengikuti kemajuan dan memiliki daya tarik bagi para pembacanya. Kalau dulu kurang sekali menyinggung isu-isu "critiek" dan politik, sejak awal abad ini mulai mempropagandakan gagasan "kemajuan" dan keinginan untuk menjadi "modern".

Dorongan untuk menciptakan kondisi baru semacam itu dimulai lewat perkumpulan sosial, lewat surat kabar, kemudian juga lewat pendidikan dan organisasi politik. Dalam tahun 1901, sebuah majalah bumiputra, *Insoelinde*, diterbitkan sebagai "jurnal" untuk para guru dan pegawai bumiputra. Insoelinde merupakan gebrakan pertama untuk mendorong ide-ide tentang kemajuan dan memiliki korespondennya di seluruh Nusantara. Salah seorang penulis tetap Insoelinde, Bagindo Tan Ameh, dalam artikelnya berjudul "Pengharapan pada Kota Padang" menyadarkan pembacanya dengan kata-kata menggugah berikut: "Lihatlah Jepang", tulisnya, "selama 30 tahun bangsa itu telah berkembang cepat. Negara itu sekarang kaya dan rakyatnya tepelajar" (*Insoelinde*, 2, 1903).

Para penulis utama dalam jurnal itu, umumnya generasi pertama guru berpendidikan Barat, yang sangat percaya bahwa cara untuk mencapai "kemajuan" adalah melalui pengembangan sistem sekolah modern. Mereka antara lain menuntut bahwa masa pendidikan mestinya tidak lebih lama daripada yang dipraktekkan di sekolah-sekolah agama yang mereka nilai telah ketinggalan zaman; murid-murid seharusnya tidak disesatkan oleh bahan pengajaran lama yang sudah kuno dan tidak menolong murid keluar dari persoalan zamannya.

Pada awal 1904, gagasan kemajuan ditafsirkan kembali oleh Abdoel Rivai, seorang mahasiswa kedokteran asal Minangkabau di Belanda, yang bekerja sebagai editor *Bintang Hindia*, sebuah jurnal yang sangat berpengaruh di kalangan kaum terpelajar Indonesia di awal abad ini. Ia menyarankan agar perasaan "kebanggaan nasional" seharusnya membentuk kekuatan pendorong utama menuju "kemajuan". Karena itu, ia juga menekankan perlunya psikologi pengajaran, sehingga "Indonesia" mampu ikut serta dalam dunia modern. Mengikuti "kemajuan", menurutnya, tidak berarti menghapuskan identitas bangsa itu sendiri, karena dunia modern mencakup kompetisi yang terus menerus antara bangsa. "Indonesia", ujarnya, "akan tetap menjadi Indonesia, tidak soal bagaimana mereka berkembang".

Orientasi "kemajuan" yang dibayangkan A. Rivai barangkali lebih bersifat budaya ketimbang politik. Namun seruannya dalam pelbagai tulisannya telah membangunkan publik pembacanya terhadap persoalan sentral dalam debat sezaman yang kemudian meluas ke gerakan politik. Ini nantinya terus bergulir sampai munculnya pergerakan yang lebih terorganisir.

Cabang lain, yang meniupkan ide baru tentang "kemajuan" telah muncul di Padang lewat gerakan *Kaum Muda.* Didirikan tahun 1906, jadi lebih awal dua tahun daripada gerakan Budi Utomo di Jawa, Kaum Muda adalah sebuah organisasi pergerakan modern pertama di Kota Padang, yang menggunakan perkumpulan dan media koran dan tulisan-tulisan dalam membina kegiatan pergerakan mereka.[42] Seperti kebanyakan rekan-rekan mereka yang berpendidikan Barat, kaum intelektual muda berwawasan Islam menyambut gagasan tentang "kemajuan" dengan penuh semangat. Umumnya berasal dari kalangan intelektual yang mendapat pengaruh dari cita-cita gerakan *Pan Islamisme* Timur Tengah.[43]

Gerakan itu mendapat pengaruh dari gerakan pembaharuan di bawah pimpinam ulama besar Mesir, Mohammad Abduh. Cita-cita kemerdekaan berfikir, pada saat yang sama juga bersentuhan

[42] Tentang *Gerakan Kaum Muda* lihat Deliar Noer,

[43] Tentang *Pan Islamisme* lihat Anthony Reid, "

MILIK PERPUS
UNIV. NEGERI P

dengan ide tentang nasionalisme anti-kolonial atau kemerdekaan rakyat terjajah. Di Padang, gerakan itu telah diterjemahkan secara kreatif ke dalam apa yang lazim disebut gerakan kaum modernis. Mereka mulai melancarkan serangan-serangan intelektual terhadap kelompok pendukung ajaran lama, yang menjadi kubu kelompok konservatif *Kaum Tua*.

Gerakan *Kaum Muda* ini mulanya berjuang melakukan revisi terhadap pemahaman "tradisional" tentang adat dan agama dengan cara yang lebih "maju". Mereka ingin menegakkan kehidupan yang lebih demokratis sesuai dengan jiwa ajaran adat Minangkabau yang berkembang dalam masyarakat di pedalaman. Di Padang, sasaran utama mereka ialah kaum bangsawan di kota itu, yang dianggap sangat feodal. Di bidang keagamaan mereka ingin memperbaharui praktek keagamaan yang sering bercampur-aduk dengan mistik, yang diajarkan ulama-ulama *Kaum Tua*.

Salah satu soal yang diperdebatkan itu, misalnya, adalah soal penetapan hari raya Idul Fitri di Mesjid Ganting. Mesjid ini merupakan ajang pertarungan antara kedua kelompok ini. Kebetulan di sana ada dua imam mesjid yang mewakili kedua kubu ini. Serangan terhadap kelompok *Kaum Tua* yang berafiliasi dengan kelompok kaum adat, yang *nota-bene* adalah elit bangsawan "tradisonal" yang pro Belanda menimbulkan polemik dan debat panas antara kedua kelompok itu.

Tokoh utama Kaum Muda dalam perdebatan itu ialah Datuk Sutan Maharadja. Menurutnya "kemajuan" haruslah merupakan perluasan dan artikulasi dari cita-cita ideal adat Alam Minangkabau yang demokratis dan terbuka dengan kemajuan zaman. Gerakan itu jelas-jelas menentang kaum bangsawan Padang, yang berpusar sekitar keluarga *Regent* Padang, yang mempertahankan *status-quo* darah bangsawan mereka sebagai "manusia kelas satu" dengan manusia kebanyakan.

Datuk Sri Maharadja juga menjadi pelopor pendidikan untuk kaum perempuan. Pada tahun 1909 ia mendirikan sekolah tenun yang pertama di Padang. Semua murid-muridnya adalah anak-anak perempuan. Tiga tahun kemudian, sekolah serupa sudah

berkembang menjadi 12 buah di kota yang sama. Sebagai bagian dari propaganda untuk memajukan pendidikan kaum perempuan, ia juga mendirikan sebuah mingguan wanita yang pertama, bernama *Soenting Malajoe*. Surat kabar ini terutama ditujukan untuk kaum terpelajar wanita Minangkabau dan diasuh oleh tokoh wanita, Zoebaidah Ratna Djowita, putri Dt. Sri Maharadaja sendiri. Redakturnya kemudian digantikan oleh Rohana Kudus, yang sering dijuliki sebagai *Kartini van Sumatra*.[44]

Di Padang juga terdapat sejumlah perkumpulan perempuan di Padang seperti *Vrouwenbond, Meisjesbond, Perserikatan Kaoum Iboe*. Mereka secara bersama-sama juga menerbitkan sebuah majalah bulanan bernama *Asjrak*. Di seluruh Hindi awal abad ini, gerakan perempuan Minangkabau paling terkenal dan banyak diberitakan dalam surat-kabar lokal atau di Batavia. Patut dicatatkan di sini nama Nawawi gelar Sotan Ma'moer, pensiun guru Sekolah Raja di Fort de Kock (Bukittiggi). Anak perempuan Engku ini, Sjarifah namanya, adalah angkatan pertama masuk sekolah guru di Padang dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke *Kweeskchool* Salemba di Weltevreden. Semenjak itu minat orang tua untuk menyekolah anak-anak perempuan mereka semakin bertambah besar.[45]

Seorang tokoh perempuan yang lain, Mijoefrouw Sa'adah dari Seberang Padang, tamatan "Sekolah Raja" Bukittinggi, aktif mengadakan *openbare vergadering* (rapat terbuka) di Padang. Para pendengarnya bukan hanya kaum perempuan, tetapi juga para orang tua, kaum bapak. Dia "meminta soepaja bapak-bapak meroentoehkan pikiran lama tentang kamadjoean perempuan". Sa'adah juga menjadi pimpinan surat kabar *Soeara Perempoean*. Surat kabar milik orang Belanda, tetapi dipimpin oleh orang bumiputra, yaitu *Tjaja Soematra*, diam-diam juga menaruh simpati dan dukungan terhadap suara perempuan dan menghendaki penghargaan yang lebih tinggi terhadap kedudukan perempeoan dalam memperoleh kesempatan pendidikan modern. Koran-koran Padang lainnya seperti *Sinar Sumatra, Radio*, juga menyediakan

[44] Parada Harahap (1926), hal. 82.

[45] Parada Harahap (1926), hal. 82.

ruangan khusus untuk suara kaum perempuan.

Tetapi tokoh *Kaum Muda* yang paling terkemuka di Padang sebenarnya ialah Abdoellah Ahmad. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan agama (ia sendiri tamatan Kairo), tokoh ini tidak seperti kebanyakan tokoh-tokoh Islam generasinya yang cenderung memusuhi, amat menghargai pendidikan Barat. Memiliki hubungan baik dengan sejumlah kaum intelektual berpendidikan Barat, yang bersimpati dengan pendidikan kaum perempuan *Kaum Muda* mendirikan organisasi *Sarikat Usaha.* Perkumpulan ini memperoleh dukungan dana dari para pedagang Padang. Mereka inilah kemudian yang bertindak sebagai yayasan dalam mendirikan *Sekolah Adabiah* tahun 1915, sebuah sekolah kaum modernis pertama yang merintis penggabungan murid-murid perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 1916 Sekolah H.I.S. Adabiah baru memiliki murid 90 orang dengan murid 75 laki-laki dan 15 perempuan. Beberapa tahun kemudian didirikan dua buah sekolah Adabiah; sati Frobelschool (taman kanak-kanak) dan satu lagi H.I.S. dengan jumlah murid sudah 750 orang.[46] Sekolah itu sejak semula telah menarik perhatian pemerintah, sehingga mendapat *regeering subsidie* (subsidi pemerintah). Tetapi juga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, barangkali karena inilah sekolah umum pertama dengan memakai Islam sebagai dasar atau prinsip ideologinya dan bahan pengajarannya pun juga campuran antara materi agama dan vak umum.

Masih berhubungan dengan inisiatif *Kaum Muda,* sekolah agama yang pertama, yang memakai sistem baru dengan memasukkan vak umum dalam pengajarannya ialah *Diniyah School* Padang Panjang.[47] Sekolah itu didirikan tahun 1915 oleh Zainuddin Labai el Junusi, kemudian diikuti oleh Surau Jembatan Besi di kota yang sama, yang kemudian berkembang menjadi sekolah *Sumatra Thawalib* (1918), di bawah pimpinan Syekh Haji Abdul Karim Amarullah, lebih dikenal

[46] Parada Harahap (1926), hal. 103-4.

[47] Dalam tahun 1921 didirikan pula sekolah khusus untuk wanita, *Diniyah Putri*, oleh Rahmah el-Yunusiah, saudara Zainuddin Labai, pendiri *Diniyah School.*

dengan julukan Haji Rasul, ayah Hamka. Sumatra Thawalib menjadi sarang kaum pergerakan yang sangat aktif dalam debat-debat politik dan basis komunis Islam yang unik, dan sebagaimana yang akan dilihat nanti ia juga memiliki jaringan dengan kaum pergerakan di Padang.

Sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh *Kaum Muda* terus berkembang sejalan dengan majunya pergerakan politik nasional di daerah ini. Sampai tahun 1933 terdapat sekitar 600 buah sekolah untuk kedua jenis jenjang pendidikan rendah dan menengah yang tersebar di Sumatra Barat dan menampung sekitar 70.000 ribu murid. Kesemuanya menampung murid-murid tamatan *volksschool* (sekolah rakyat desa) Tidak kurang pentingnya ialah dibukanya pendidikan lanjutan seperti *Islamic College* dan *Normaal School* di Padang dan di daerah. Sementara itu, sekolah-sekolah yang didirikan atas inisatif *Kaum Tua* juga berkembang pesat, mencapai 589 buah.[48]

Di tengah-tengah maraknya kemajuan pendidikan di Sumatra Barat tahun 1920-an, pelbagai macam perkumpulan yang sudah muncul sejak awal abad ini memiliki hubungan dekat, kalau bukan menjadi tokoh pergerakan. Perkumpulan sosial seperti *Sport Vereeniging Minangkabau* adalah Persatuan Olahraga Minangkabau yang digiatkan oleh para pemuda. Perkumpulan olahraga yang dipimpin oleh dr. Hakim dan Tuan Samad itu semakin hari semakin populer menyaingi olahraga tenis, yang juga sudah tersebar di mana-mana dan menyaingi perkumpulan sepak bola Belanda, *West Sumatra Voetbal Club* yang tidak memberi tempat kepada pemuda bumiputra untuk ikut di dalamnya.

Pelbagai macam perkumpulan wanita yang disebutkan di atas, atau *School Vereeniging Minangkabau* yang bergerak dalam menyediakan dana bagi pengembangan lembaga sekolah dan sejumlah organiasi sosial lainnya menjadi basis bagi kegiatan pergerakan politik pada masanya. Ketika organisasi perkumpulan Budi Utomo dicetuskan di Jawa pada 1908, di Padang dua tahun sebelumnya (1906) sudah muncul gerakan *Kaum Muda* sebagai

[48] Taufik Abdullah, "Pendidikan dan Revolusi di Sumatra Barat", dalam Collin Wild dan Peter Carrey (eds.), *Gejolak Api Revolusi* (Jakarta: Gramedia, 1986), hal. 40.

perkumpulan yang lebih maju daripada yang berkembang lain tempat. Gerakan Budi Utomo yang kemudian secara resmi diperingati sebagai simbol kebangkitan nasional mulanya hanyalah organisasi pemuda untuk kalangan terbatas, khususnya kaum *priyayi* Jawa untuk tujuan memelihara kebudayaan mereka. Namun *Kaum Muda*, yang mendapat inspirasi dari Gerakan Turki Muda, memiliki wawasan yang universal karena cita-cita "kemajuan" yang disuarakannya mencakup semua lapisan masyarakat. Lagi pula ia tidak semata-mata ditujukan untuk daerah, melainkan untuk "kemajuan" orang Islam di Hindia.

Memang, perkumpulan yang benar-benar mewakili suatu pergerakan politik nasional baru muncul beberapa tahun kemudian. Dalam hal ini kehadiran Sarekat Islam (SI) dapat dilihat sebagai organisasi massa pertama di Indonesia, yang didirikan di Surakarta tahun 1912 dan di Padang sekitar tahun 1914. SI Cabang Padang sudah mengirimkan utusan mereka ke Kongres Nasional SI yang pertama di Bandung tahun 1916.

Meskipun SI pada mulanya sulit diterima oleh daerah ini, terutama karena rintangan dari pejabat pemerintah, tetapi organisasi pergerakan itu memiliki daya tarik sendiri bagi penduduk Sumatra Barat. Barangkali karena dua orang di antara tiga tokoh terkemuka SI Pusat adalah orang Minangkabau, yaitu Abdoel Moeis dan H. Agoes Salim. SI masuk ke Padang lewat beberapa orang perantau Minangkabau yang telah lebih dulu menjadi tokoh SI di Aceh, yaitu Hadji Achmad, seorang ulama-pedagang asal Padang dan Chatib Ali, seorang ulama-pedagang *Kaum Tua.*

Dalam waktu singkat SI segera memperoleh banyak pengikutnya dalam waktu singkat. Anggotanya terutama berasal kalangan pedagang dan kaum terpelajar dan sebagian juga petani di pinggiran kota. Adanya dua tokoh Minangkabau dalam kepemimpinan SI Pusat, seperti Abdoel Moeis dan H. Agoes Salim, yang sudah harum namanya di kalangan kaum terpelajar, ikut menolong pemimpin SI lokal di Padang dalam propaganda merekrut pengikutnya yang baru. Meskipun begitu ada juga kendala yang menghalangi penyebaran SI, terutama dari kalangan kaum adat, seperti dari Datoek Soetan

Maharadja, yang sebelumnya penganjur Kaum Muda, tetapi kemudian menjelang meninggalnya tahun 1921 berpaling menjadi kubu kaum tua. Dia amat mencurigai SI dan "menghasoet kawan-kawannja soepaja djangan maoe mendengar ketjek Toean Moeis, sebab orang itoe katanja tidak bergelar, dan tidak orang Minangkabau sedjati.... Adat Minangkabau kaanya mengikoet tooroenan iboe...".[49]

Meskipun tidak diketahui berapa jumlah pengikut SI di Sumatra Barat dan Padang khususnya, data umum Indonesia mencatat bahwa pada tahun 1914 saja, yakni dua tahun setelah berdirinya, SI memiliki pengikutnya lebih dari 360 ribu orang, dan cabangnya dengan cepat sudah menyebar ke luar Jawa. Sementara Budi Utomo, yang dianggap sebagai simbol kebangkitan nasional itu, pada puncak kejayaannya hanya mempunyai anggota sebanyak 10 ribu orang.[50] Pada tahun 1915 SI mencapai puncak kejayaannya dengan jumlah anggotanya hampir dua setengah juta orang. Sebagian besar pengikutnya tersebar di Jawa, Sumatra Selatan (Jambi, Lampung dan Palembang), Banjarmasin, Batavia dan Sumatra Barat.

Ketika SI mempertegas gerakannya dengan mengubah namanya menjadi partai, yaitu Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1920-an, partai itu menjadi salah satu partai Islam yang kuat di Sumatera Barat. Menjelang kejatuhan kekuasaan kolonial, beberapa tokoh terkemuka PSII ialah H. Udin Rahmani, Aziz Chan dan H. Harun Junus.

Pergerakan politik lainnya ialah *Insoelinde*, diambilkan dari nama mingguan yang sudah berkembang sejak awal abad ini. Sejak tahun 1916 berubah menjadi organisasi kaum nasionalis di bawah pimpinan Marah Sutan, seorang guru dan penulis terkemuka Minangkabau yang pada masa ini menjadi ketua cabang partai di Batavia. *Insoelinde* kemudian menyebarkan cabangnya ke Padang dan di Solok. Pengikut partai ini umumnya adalah guru pemerintah dan pemimpin adat di kota. Ketua *Insoelinde* Padang dipegang oleh Soelaiman Efendi, seorang aristokrat Padang yang radikal dan Radja

[49] Parada Harahap (1926), hal. 100.

[50] Akira Nagazumi dalam Collin Wild dan P.Carry (1986), hal. 15.

Ibrahim, seorang bekas pegawai negeri yang sangat giat meluaskan cabangnya ke pedalaman. Partai ini kemudian berubah nama menjadi *Nationaal Indisch Partij* (NIP)[51] dan dalam tahun 1920-an bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Sukarno.

Dalam tahun 1916 kelompok kaum adat mendirikan organisasi *Sarekat Adat Alam Minangkabau* (SAAM). Meskipun bersimpati dengan Kaum Muda, hubungan mereka lebih dekat dengan pemerintah. Dalam tahun 1937, SAAM berkembang menjadi *Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau* (MTKAAM). Ketuanya semula langsung dipegang oleh Residen, sedangkan pengurus dan anggotanya yang lain adalah kelompok penghulu yang loyal terhadap pemerintah. SAAM atau MTKAAM adalah organisasi eksklusif untuk kaum adat, mirip dengan LKAAM zaman Orde Baru. Untuk menunjukkan hubungan baiknya dengan penguasa kolonial, pada tahun 1919, misalnya, SAAM membangun tugu peringatan seratus tahun kembalinya Belanda ke Sumatra Barat. Tugu itu terletak di dekat kantor *Raad van Justitie*, dekat Taman Melati Padang, tetapi sekarang tidak dikenali lagi.

Tidak jauh dari sana juga terdapat tugu peringatan *Jong Sumatranen Bond*, yang menjadi simbol berlawana dari yang di atas. Kalau tugu SAAM mengembalikan ingatan orang kepada kesetiaan dan keharmonisan hubungan dengan penguasa kolonial, tugu *Jong Sumatranen Bond* merupakan simbol organisasi pergerakan nasional anti-kolonial. Tugu itu dibuat untuk memperingati kongres pertama pemuda Sumatra, yang berhimpun dalam *Jong Sumatranen Bond* (JSB -- Sarekat Pemuda Sumatera). Inilah perkumpulan kaum nasionalis yang paling bergengsi pada tahun 1920-an. Didirikan oleh kaum terpelajar Sumatra tahun 1917, cabangnya di Padang dibentuk satu tahun kemudian (1918). Para pengikutnya umumnya terdiri dari murid-murid sekolah menengah MULO dan memiliki hubungan baik dengan kelompok Kaum Muda, SI dan *Sarekat Usaha* yang memberikan tempat atau ruangan kantornya untuk menjadi markas

[51] Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)* (Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1971), hal. 28.

JIB.

Ketua JSB yang pertama ialah Tengku Mansor, seorang pelajar STOVIA di Batavia berasal dari keluarga Kerajaan Sumatra Timur. Pada pidato pengangkatannya, Tengku Mansor menegaskan dasar perkumpulan itu, dalam kata-katanya sendiri dalam bahasa Belanda, ditegaskan "Alleen een vereenigd Sumatra kan Sumatra's grootheid zijn" (hanya dengan Sumatera yang bersatu, kebesaran Sumatra dapat diciptakan). Tetapi Tengku itu tidak berfikir tentang idealisme Sumatra *aan sich*. Cita-cita "persatuan Hindia" hanya mungkin dengan kerja sama antara sesama "rasgenooten" (suku-suku) yang ada di Hindia. "Vereenigt u Sumatranen, zoekt samenwerking met tusschen en onder elakaar; en tracht dia ook ter verkerijgen bij onze rasgenoten, de Javanen, Amboneezen, Manadoneezen en bij de rest ban Indie's bevolking." (Bersatulah kawan-kawan Sumatra, binalah kerja sama dengan rekan-rekan dari suku bangsa Jawa, Ambon, Menado dan penduduk Hindia lainnya).[52]

Ketua *Jong Sumatra* yang kedua, Amir, mahasiswa kedokteran, putra Minangkabau yang kemudian aktif di Sumatra Timur, membawa organisasi itu ke haluan berwarna *cultuur* (kebudayaan). Tetapi ketika *Jong Sumatra* berada di bawah Bahder Djohan, juga mahasiswa kedokteran asal Minangkabau, sikap organisasi pemuda Sumatra itu sampai penghabisan tahun 1925 lebih progresif. Bahder Djohan mulai mengemudikan *Jong Sumatra* ke arah yang bersifat *sociaal-economisch* dan sedikit banyak menyuarakan politik pergerakan. Ini terbukti kemudian ketika Jong Sumatra bergabung dengan Kongres Pemuda tahun 1926, yang kemudian berlanjut dengan lahirnya "Sumpah Pemuda" 1928 yang terkenal itu.

Pada tahun 1918 di Padang sudah terdapat sekitar 30 organisasi sosial dan kebudayaan yang berada di bawah pengaruh *Jong Sumatra*. Dalam rapat umum yang diadakan di Bukittinggi tahun itu, mereka kemudian memutuskan untuk membentuk federasi organisasi pemuda se-Sumatera, sehingga lahirlah apa yang dinamakan *Sumatranen Bond* atau "Sarekat Sumatera". Atas anjuran dua tokoh Minang yang duduk dalam *Volksraad* pusat, yaitu Abdeol

[52] Parada Harap (1926), hal. 49-50.

Moeis dan Abdoel Rivai, markas pusat organsasi itu dipindahkan ke Batavia. Menurut mereka partai politik yang demikian seharusnya memiliki markas besarnya di Batavia karena di sana ia bisa berfungsi sebagai "kelompok penekan" untuk memilih wakil-wakil Sumatra dalam *Volksraad*.

Partai itu berperan besar sebagai kekuatan yang menjembatani kegiatan pergerakan politik di Jawa (Batavia) dan Minangkabau. Namun demikian, lama kelamaan kehilangan ciri aslinya untuk menjadi suatu federasi organisasi politik Sumatra ketika roda organisasi hampir sepenuhnya dikendalikan oleh kepemimpinan pusat di Batavia. Kebetulan sejak bulan April 1919, Bagindo Zainuddin, anak Pak Haji Rasjid, seorang pedagang besar di Pasar Gadang, pulang ke Padang. Dia menamatkan pendidikannya pada Sekolah Tinggi Pertanian Wageningen, merupakan orang kedua yang pernah mencapai titel sarjana Minangkabau; yang pertama, menurut Hata, ialah dr. A. Rivai.[53] Sebelumnya bekerja sebagai "lanbouwconsulent" (dinas pengawas pertanian) di Jawa. Ketika pulang ke Padang, oleh Inyiak Basa Bandaro, pedagang besar di Pasar Gadang, ia ditawarkan menjadi direktur "Kerukunan Orang Minangkabau" (KOM). Insinyur pertanian itu lebih suka bergerak dalam bidang swasta daripada tetap di pemerintah. Ia menerima tawaran sebagai direktur KOM. Tetapi selama di masa kepemimpinannya KOM menghadapi bayak kesulitan dalam segala hal yang diperlukan oleh sebuah organisasi dagang. "Dia ahli tanaman dan bukan orang dagang", seru seorang anggota KOM, sambil menawarkan kesediaan Hatta untuk menggantikannya nanti kalau dia sudah tamat dari kuliahnya nanti di Belanda.[54]

Bagindo Zainuddin nantinya aktif dalam "Sarikat Combinatie Minangkabau" (SCM), yang berupaya menjembatani organisasi politik di daerah ini. SCM memperoleh pengikutnya dari kalangan simpatisan gerakan Kaum Muda dan mengambil sikap kooperatif dengan pemerintah. Tetapi setelah berada di bawah kepemimpinan Sulaiman Efendi, yang sebelumnya adalah tokoh *Insoelinde*, gerakan

[53] Moh. Hatta, *Memoir* (Jakarta: Tintamas, 1982), hal. 100.

[54] *Ibid.*

terkemukanya seperti Haji Moh. Noer Ibrahim, Haji Imam Samad, Tawi, Zainun memiliki hubungan dengan parewa Si Patai dan Gandjil.[58]

Karena kegiatan politik yang dilancarkan gerakan "Sarekat Djin" lewat pemogokan buruh pelabuhan Emmahaven dan rencana pembunuhan terhadap sejumlah pejabat Belanda, Soetan Said Ali dan beberapa orang temannya ditangkap tahun 1926 dan dibuang ke Penjara Glodok, Batavia. Dalam bulan Januari 1927 orang komunis Sumatra Barat (dan pada saat yang sama juga di Banten) mengorganisir pemberontak besar-besaran menyerang pemerintah kolonial. Aksi pemberontakan dipusatkan Silungkang dan Ombilin, daerah kaum buruh tambang dan pedagang dengan otak pergerakan di Padang Panjang di bawah pimpinan Arif Fadillah.

Ibrahim Tan Malaka, salah seorang tokoh sentral terkemuka PKI pada masa ini sangat menentang rencana pemberontakan itu dan menyesalkannya sebagai tindakan bodoh dan ceroboh. Namun para pemimpin yang tidak sabaran akhirnya nekat menempuh jalan sendiri. Pemberontakan itu berakibat buruk terhadap semua gerakan politik di Hindia Belanda, sehingga dalam tahun 1930-an kemudian Gubernur Jenderal Belanda di Betawi semakin bersikap *opressive* terhadap semua pergerakan politik.

* * *

Selama tahun 1920-an partai-partai politik dan sekolah telah berperan menjembatani berbagai kelompok masyarakat pluralistik di berbagai kota. Pada masa ini, unsur-unsur gerakan politik nasional yang berbasiskan kepada tiga aliran utama: Islam, nasionalisme sekuler dan komunisme sudah mempersatukan kekuatan ideologi pergerakan. Tetapi selepas pemberotakan komunis 1927 karakter pergerakan mengalami beberapa perubahan penting sampai tahun 1930-an kemudian.

Tindakan keras Belanda selama tahun 1930-an telah mengubah sepenuhnya situasi politik di Sumatera Barat. Seterusnya setiap

[58] Benda and McVey, eds. (1969), hal. 150.

kegiatan politik, baik yang terjadi dalam saluran-saluran yang direstui Belanda, maupun yang bergerak di bawah tanah. Sejumlah organisasi politik yang memiliki pegikut yang besar sehabis pemberontakan PKI 1927, justeru lebih berkembang di luar Padang, terutama yang berpusat di Padang Panjang. Hal ini merupakan bagian dari upaya mereka menghindari tindakan keras penguasa terhadap semua pergerakan politik. Muhammadiyah adalah organisasi sosial dan pendidikan Kaum Muda yang masih dibiarkan bertahan sejak masuk ke Sumatra Barat tahun 1926. Berada di bawah pimpinan Dr. Abdoel Karim Amarullah atau lebih dikenal dengan Haji Rasul, Muhammadiyah lebih berkembang di Padang Panjang. Berbeda dengan Muhamadiyah di Jawa, di Sumatera Barat organisasi itu tidak membatasi dirinya pada kegiatan di bidang pendidikan dan sosial semata, melainkan juga terlibat politik. Dalam 1930-an, Muhammadiyah adalah satu-satunya organisasi Islam yang ditolerir oleh Belanda di Sumatera Barat. Namun begitu organisasi itu toh tidak mendapat jatah kursi dalam *Minangkabau Raad,* yaitu suatu dewan penasehat yang dibentuk Belanda tahun 1938.[59]

Partai besar yang amat populer di awal tahun 1930-an, ialah *Persatoean Moeslimin Indonesia* (Permi) yang juga berpusat di Padang Panjang.[60] Didirikan dalam tahun 1928, Permi berkembang dengan sangat cepat dan mencapai kejayaannya di bawah kepemimpin "trio" pentolan politisi terkemuka: Muchtar Luthfi, H. Iljas Ja'kub dan H. Djalaluddin Thaib. Kedua tokoh yang pertama adalah bekas mahasiswa aktifis di Kairo,[61] sedang Djalaluddin Thaib adalah seorang guru mengajar di Thawalib dan *Diniyah School* sejak ia kembali dari Mekkah tahun 1914. Ketiganya dikenal sebagai aktifis politik paling terkemuka di Sumatra Barat sebelum perang.

Selama dua tahun terakhir keberadaannya, Permi berada di bawah kepemimpinan tokoh wanita Rangkayo Rasuna Said dan

---

[59] Lihat M. D. Mansoer [et. al.], *Sedjarah Minangkabau* (Djakarta: Bhratara, 1970), hal. 184-85.

[60] Menurut data Taufik Abdullah, pada tahun 1933 sekitar 11.000 orang pengikut Permi, 30% di antaranya wanita, Abdullah (1971), hal. 184.

[61] Tentang kegiatan tokoh ini di Kairo, lihat William R. Roff, "Indonesia and Malay Students in Cairo in the 1920's," dalam *Indonesia,* 9 (April 1970), hal. 73-87; Taufik Abdullah, (i971) hal, 139 ff.

Mansur Daud Dt. Palimo Kayo. Kedua tokoh ini berhasil membawa partai itu ke dalam gerakan yang lebih moderat. Sesuai dengan pendirian partai, yang dibentuk atas prinsip Islam dan nasionalisme, Permi mengambil sikap politik "non-kooperasi" dan memiliki hubungan dekat dengan PNI Sukarno (Partai Nasional Indonesia) kemudian juga dengan PNI-Baru Hatta.

Sejak semula pihak pemerintah Belanda sangat mencurigai Permi, terutama karena kegiatan partai yang aktif mendorong lembaga pendidikan milik kaum reformis. Para pemimpinnya berhasil menanamkan kesadaran nasionalisme anti-kolonial. Sebaliknya penguasa Belanda karena mencurigai sekolah-sekolah kaum reformis sebagai "sarang politik" memberlakukan apa yang disebut *Goeroe Ordonantie* tahun 1928. Undang-undang itu a.l. bertujuan untuk mengontrol kegiatan guru di luar kegiatan pengajaran. Pemerintah Belanda tampaknya masih mengidap trauma terhadap kehadiran sekolah-sekolah sebagai "sarang" pergerakan politik yang berbahaya. Mereka masih dihantui oleh apa yang mereka saksikan dengan ancaman yang timbul dari penggabungan anasir gerakan Islam dan gerakan politik radikal (komunis), seperti yang ditunjukkan sebelumnya lewat ajaran Haji Datuk Batuah dan rekan-rekannya di sekolah *Sumatra Thawalib* Padang Panjang.

Meskipun tokoh ini dan sejumlah tokoh komunis di berbagai kota telah ditangkap beserta pengikut-pengikut "komunis-Islamnya tahun 1927, anasir gerakan itu tidak sepenuhnya dapat dibersihkan. Atas dasar itu, penguasa Belanda memerlukan kontrol yang lebih ketat terhadap guru-guru dan sekolah. Namun karena dirasa belum efektif, maka di tahun itu diterapkan lagi undang-undang baru, disebut *Wilde Schoolen Ordonantie* (Undang-Undang Sekolah Liar) tahun 1932. Kali ini tujuannya membendung usaha untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta oleh bumiputra dan pada saat yang sama mengatur dan menghapuskan sekolah-sekolah yag dinilai tidak memenuhi kriteria politik pendidikan kolonial.

Kedua undang-undang kolonial itu mendapat protes lewat aksi-aksi demonstrasi para guru dan pengurus sekolah, termasuk dari

MILIK
UNIV.

organisasi sosial kaum adat. Dalam semua ini adalah tokoh-tokoh Permi yang paling berperan menyatukan semua organisasi agama, baik tradisional (Kaum Tua) maupun modern (Kaum Muda) untuk menyusun kekuatan menentang pemberlakuan undang-undang tersebut. Kekhawatiran akan meluasnya gerakan anti-pemerintah telah menyebabkan Belanda membatalkan maksudnya menghapuskan Permi.

Namun sejalan dengan politik kolonial yang semakin menindas selama tahun 1930-an, Belanda mulai bertindak lebih keras terhadap semua gerakan politik. Penekanan-penekanan lewat peraturan baru seperti *vergaderverbod* (larangan rapat) sangat akrab di lingkaran kaum pergerakan masa ini dan menimbulkan kekecewaan. Semua bentuk pertemuan lebih dari lima orang dilarang, apalagi untuk mengadakan rapat-rapat politik tanpa izin pemerintah. Peraturan larangan rapat politik itu berlaku untuk seluruh Indonesia sebagai alat untuk menjegal kegiatan pergerakan.

Di Sumatera Barat peraturan itu sudah barang tentu ditujukan terhadap Permi sebagai satu-satunya partai politik yang masih hidup, tetapi pada prinsipnya ruang gerak semua pergerakan yang tidak membawa nama partai sekalipun sudah semakin sulit. Sejumlah tokoh Permi dengan sendirinya masuk perangkap. Dalam hal ini termasuk Ilyas Jakub, Muchtar Luthfi dan Djalaluddin Thaib. Mereka akhirnya dibuang ke Digul dan Belanda terus menerus membuat porak-poranda Permi sampai akhirnya partai itu dibubarkan tahun 1936. Tetapi ini saja tidak cukup untuk membuat damai Belanda.[62]

Antara bulan November 1932 sampai September 1933, ada lima puluh lima orang tokoh Permi yang ditangkap. Tindakan penangkapan terus berlanjut sampai pertengahan tahun berikutnya. Pada bulan-bulan terakhir tahun 1933, tidak hanya Muchtar Luthfi, Ilyas Yacub dan Djalaluddin Thaib yang ditangkapi, tetapi juga pimpinan PSII Sumatera Barat: Hadji Uddin Rahmany, Sabillah Rasah

[62] Audrey Kahin (1997), hal. 33-34.

dan Datuk Singo Marajo dibuang ke Digul awal tahun 1934.[63]

Sebagian besar nasib mereka yang ditangkap ini amat menderita dan menjadi berantakan selama menjalani masa-masa pahit dalam penjara pembuangan di Digul. Di antara tiga pemimpin puncak Permi, akhirnya hanya Ilyas Yacub saja yang dapat kembali bergabung dalam kepemimpinan Republik di Minangkabau pada masa perjuangan kemerdekaan nantinya. Belanda mulanya malah tetap menolak memberi izinnya untuk kembali ke Indonesia, tetapi toh akhirnya diizinkan juga pulang sewaktu diadakan Persetujuan Linggarjati.[64]

Setelah pembubaran Permi, kegiatan politik pergerakan di Padang khususnya dan di Sumatra Barat umumnya hampir tidak pernah muncul ke permukaan lagi. Selama beberapa tahun masa hidupnya, Permi telah berhasil menyatukan dalam dirinya tujuan-tujuan nasionalis agama dan sekuler, yang tidak pernah dapat dicapai oleh partai-partai manapun juga dan keunggulan kepemimpinannya dalam melancarkan gerakan anti-Belanda di Sumatera Barat tidak pernah tertandingi oleh tokoh-tokoh pergerakan yang lain. Namun sesudah itu hanya kelompok ulama *Kaum Tua*, yang sebelumnya kalah pamor dengan Parmi semasa partai Islam itu masih berjaya, berhasil mendirikan organisasi perkumpulan yang mereka namakan *Persatuan Tarbijah Islamijah* (Perti) tahun 1941 di bawah pimpinan Syekh Sulaiman ar-Rasuli di Candung.

Namun akan kelirulah untuk menyimpulkan bahwa dengan terjadinya penangkapan-penangkapan dan pengasingan para pemimpin politik selama pada pergantian tahu 1920/ 1930-an

---

[63] Taufik Abdullah, *Schools*... (1971), hal. 202-6.

[64] Muchtar Luthfi tidak kembali ke Sumatera Barat, melainkan menetap di Makasar. Djalaluddin Thaib bekerja untuk Belanda di Melborne dan diperintahkan kembali bersama Belanda ke Minangkabau sebagai perwira penghubung untuk Belanda. Dia ditangkap oleh kaum Republik dan akhirnya dibebaskan tahun 1947 atas desakan Wakil Presiden Mohammad Hatta, setelah bersedia untuk memberikan kerja samanya kepada Republik. Dt. Singo Maradjo dari PSII, walaupun kembali ke Indonesia dengan Belanda, dia berhasil menyeberang ke pihak [Republik] Indonesia. Hatta kemudian mengirimnya kembali ke Sumatera Barat, namun ia akhirnya meninggal di awal tahun 1946. Sabilar Rasat Dt. Bandaro kembali ke Indonesia bulan November 1945, tetapi menetap di Jokyakarta selama Revolusi.

Belanda berhasil menghapuskan pengaruh nasionalis agama. Sama sekali tidak. Gagasan-gagasan dan perguruan mereka tetap hidup di sekolah-sekolah, dan terutama di lembaga-lembaga perguruan agama yang lebih tinggi seperti di lingkaran *Islamic College* yang pertama kali didirikan di Padang oleh Partai Permi pada tahun 1930 dan diperkirakan ada sekitar 13 cabangnya dengan sejumlah murid-muridnya yang tersebar di Sumatera Barat tahun 1930-an.

Organisasi-organisasi pemuda terus menyediakan saluran-saluran bagi penyebaran ide-ide mereka dan ajaran kaum pergerakan sudah tertanam sedimikian rupa di hati banyak orang-orang muda. Kesaksian seorang pengamat mencatat, bahwa "... seorang anak ketjil oemoer 14 tahoen tempoh hari saja lihat berbitjara hal *werelrevoluutie* (revolusi dunia) dan berbitajara lagi [tentang] pasal kapitalisme, tentang *staathuiskunde* (ekonomi negara) begitoelah kata seorang penoempang Eropa dalam terein antara Padang Panjang dan Fort de Kock...".[65] Pada kesempatan lain, masih pada tahun1920-an, anak-anak muda belasan tahun *beatuurlid tevens propaandist* komunis Sumatra Barat sudah berbicara tentang "perang dunia jang kedoea", tentang keadaan doenia dan datangnya sociale revolutie".[66]

Bahkan ketika partai-partai politik telah dilarang dan ketika pemimpin nasionalis senior sudah digeser atau dibungkam tahun 1930-an, mereka masih terus menghidupkan api perjuangan menentang kolonialisme Belanda. Menjelang kejatuhan Belanda, organisasi-organisasi pemuda dari kelompok Islam merupakan kelompok paling gigih menentang penguasa kolonial Belanda.[67] Walaupun kemangkusan mereka semakin merosot karena sudah terpecah-pecah dan kurangnya persatuan sejak ditinggalan para pemimpin utamanya, mereka terus memberikan perlawanan vokal

---

[65] Parada Harahap (1926), hal.100.

[66] Dokumen dikutip dari Benda dan McVey (1969), hal. 108.

[67] Ini terutama benar untuk kelompok aktivis Muhammadiyah dan juga di lingkaran pemuda PGAI di Padang dan PMDS (Pemuda Murid-murid *Diniyah School*) dan Sumatera Thawalib di Padang, yang bergabung membentuk Kepanduan *EL-Hilaal* (Bulan Sabit). *El-Hilal* merupakan organisasi pemuda yang terbesar di Sumatera Barat dengan jumlah anggota sebanyak 3.000 orang. Bouwman, *Enige Beschouwingen*, hal. 73. Lihat juga Salim dan Kotjek, *Pergerakan Pemuda*, hal. 5-6; Abdullah, *Schools* (1971), hal. 222.

terhadap penguasa kolonial, baik melalui tulisan-tulisan, pidato-pidato, maupun nyanyian- nyanyian dan drama. Pengalaman ini juga menjadi inspirasi bagi kaum pergerakan ketika berhadapan dengan penindasan di zaman Jepang.

Penutup: Zaman Peralihan

Pada tahun-tahun terakhir kekuasaannya di Indonesia, Belanda kelihatan berhasil menegakkan politik *rust en orde* (ketertiban dan keamanan). Tetapi suasana tentram dan tertib itu sebenarnya hanyalah semu belaka. Telah disinggung di atas, bahwa selama tahun 1930-an, Sumatra Barat telah kehilangan banyak pemimpin mereka yang terkemuka menyusul setelah tindakan penangkapan dan pembuangan mereka ke luar daerah, termasuk ke Digul.

Sejak itu banyak orang percaya, bahwa kaum nasionalis radikal yang didukung oleh segelintir kaum cendikiawan itu telah disingkirkan seperti yang sebelumnya dapat ditemukan dalam PKI, Permi dan PNI. Kebanyakan mereka kini tampil dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan sosial dan pendidikan yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah seperti PNI-Baru, Parindra, Indonesia Muda dan sejumlah perkumpulan pemuda yang terkesan tidak ada hubungannya dengan poltitik seperti Persatuan Adabiah, organisasi para alumni Adabiah, *Padangsche Sport Vereeniging* (PSV, Organisasi Olahraga Padang), *Padangsche Padvinderij Organisatie* (PPO, Organisasi Kepanduan Padang), "Medan Pertemuan" dan banyak lagi yang lain.

Salah seorang tokoh muda cemerlang yang sedang naik ialah Chatib Sulaiman,[68] ketua atau komisaris PNI-Baru di Sumatra Barat. Menamatkan sekolahnya di HIS Adabiah di Padang, kemudian melanjutkan sekolahnya ke MULO, dalam tahun 1930 dia bersama temannya, Leon Salim,[69] mula-mula bergabung dengan organisasi

[68] Chatib Sulaiman, anak seorang pedagang, lahir 1906 di Sumpur dekat Danau Singkarak, Padang Panjang. Keluarganya pindah ke Padang tahun 1912, dan di sini ia masuk sekolah dasar pemerintah dan melanjutkaan ke MULO. Tentang tokoh ini lihat Rivai Abu dan Abdullah Suhadi, *Chatib Sulaeman* (Jakarta: Departemen P dan K, 1976).

[69] Leon Salim lahir (9 Maret 1912) di Tiakar, Payakumbuh. Nama kecilnya Luin,

dibawa agar jangan jatuh ke tangan Jepang.

Sebagai reaksi dari rencana ini, Chatib Sulaeman bersama-sama aktivis nasionalis merencanakan demonstrasi di Padang Panjang. Mereka menyiapkan aksi protes terhadap maksud Belanda untuk membumihaguskan Padang Panjang, yang menjadi markas pusat militer Belanda untuk Sumatera Barat. Menurut pandangan mereka Belanda tidak lagi sanggup menjalankan pemerintahan. Karena itu mereka menuntut agar administrasi Belanda diserahkan kepada pihak Indonesia. Biar pihak Indonesia yang akan berunding dengan Jepang kalau mereka tiba di Sumatra Barat nanti. Tetapi rencana itu segera bocor ke tangan PID. Sebagai akibatnya, Chatib Sulaeman dan kawan-kawannya, termasuk Leon Salim, dibuang ke Kutacane, Aceh Selatan. Mereka baru dapat keluar dari tawanan Belanda setelah tempat itu dibombardir Jepang dan kembali ke Sumatera Barat, saat pejabat Belanda yang menawan mereka balik ditawan Jepang. Waktu itu, Indonesia sudah berada di bawah orde baru Jepang. ***